KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II

RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II JAMBI TAHUN 2025 - 2029

KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT BHYAYANGKARA TK. II NOMOR:
KEP/ 9 /VIII/2025 TANGGAL 12 AGUSTUS 2025

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar isi ……..……..……..... i

BAB I. PENDAHULUAN ……..…….……..... 2

1. Kondisi Umum …..……..... 3
   a. Capaian Kinerja Rumkit Bhayangkara Jambi 2020-2024……. 3
   b. Tantangan Rumkit Bhayangkara Jambi 2025-2029……. 6 10
2. Potensi dan Permasalahan..…… 7
   a. Potensi Ancaman ……..... 15
   b. Potensi Kekuatan…… 16
   c. Permasalahan …… 17

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS …..... 18

1. Visi …… ……... 18
2. Misi ……..…… 19
3. Tujuan …….. 21
4. Sasaran Strategis ……... 22
5. Hubungan Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis…….... 25
6. Penahapan Kebijakan …… 27

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN …… 28

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polri …… 28
2. Arah Kebijakan dan Strategi Rumkit Bhayangkara Jambi ..……. 58
3. Kerangka Regulasi Rumkit Bhayangkara Jambi..…….. 66
4. Kerangka Kelembagaan Rumkit Bhayangkara Jambi …….. 68

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN …….. 71

1. Target Kinerja …… 71

2. Kerangka Pendanaan …… 72

BAB V. PENUTUP ……. 74

1. Kaidah Pelaksana …….. 75
2. Autentikasi dan Distribusi …… 76

Lampiran 1 : KERANGKA PENDANAAN RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI TAHUN 2025 - 2029

Lampiran 2 : KERANGKA REGULASI RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI TAHUN 2025 - 2029

KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II

RENCANA STRATEGIS
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II JAMBI
TAHUN 2025 – 2029

A. PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Jambi Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada dokumen Renstra Polri yang disusun dengan mempedomasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan dokumen yang bersifat indikatif. Dengan telah disusunnya Renstra Polri, maka seluruh satker di lingkungan Polri perlu mempedomaninya dan menurunkannya ke dalam dokumen Renstranya masing-masing.

Rumah Sakit Bhayangkara selaku unsur pendukung di bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian yang berada di bawah Kapolri menyusun dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdokkes Polri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, Identifikasi Korban Bencana (*Disaster Victim Identification*) dan Pelayanan Kesehatan serta Kesehatan Kesamaptaan di lingkungan Polri.

Pada bagian awal Renstra Rumah Sakit Bhayangkara ini diuraikan kondisi umum yang merepresentasikan pencapaian sasaran strategis Rumah Sakit Bhayangkara selama tahun 2020-2024 serta tantangan yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang. Selain capaian dalam Renstra periode sebelumnya tersebut, potensi dan permasalahan baik yang sedang dihadapi atau yang diperkirakan akan dihadapi menjadi aspek yang dijadikan masukan dalam

penyusunan Renstra ini. Potensi dan permasalahan tersebut akan menjadi aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam menyusun perencanaan Rumah Sakit Bhayangkara untuk 5 (lima) tahun kedepan.

a. Evaluasi Capaian Kinerja Rumkit Bhayangkara Jambi 2020 - 2024

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi, Rumah Sakit Bhayangkara mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian, Kesehatan kepolisian, identifikasi korban bencana (*Disaster Victim Identification*) dan pelayanan Kesehatan serta Kesehatan kesamaptaan di lingkungan Polri.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Renstra Rumah Sakit Bhayangkara Tahun 2020 – 2024 memuat 3 (tiga) tujuan, yaitu:

a. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang professional;

b. Modernisasi pelayanan kedokteran kepolisian dan Kesehatan kepolisian; dan

c. Menerapkan manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi dan terpercaya.

Ketiga tujuan tersebut dijabarkan ke dalam Sasaran Strategis sebagai penetapan dari kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Sasaran Strategis Rumah Sakit dalam Renstra Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya pembinaan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai kebutuhan.

b. Terselenggaranya pelayanan kedokteran kepolisian yang handal dan profesional.

c. Terwujudnya SDM Rumkit Bhayangkara yang profesional berorientasi pada kompetensi teknis, kepemimpinan dan etik.

Nilai rata-rata PPK PSN Polda Jambi

(a) Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja (PK).

(1) Perilaku kerja adalah tanggapan atau reaksi seorang PNS terhadap lingkungan kerjanya.

(2) Sasaran kerja pegawai adalah renana kerja dan terget yang akan dicapai oleh seorang pegawai, yang disusun dan disepakati bersama pegawai dengan atasan pegawai.

(b) Penilaian prestasi kerja (PPK) PNS terdiri atas:

(1) sasaran kerja pegawai (SKP) = 60%

(2) perilaku kerja (PK) = 40%

(c) Reward

Persentase pemberian reward kepada personel berprestasi merupakan parameter yang digunakan oleh SDM Polda Jambi untuk mengukur tingkat pemberian reward kepada anggota Polda Jambi. Reward yang diberikan berupa Satya Lancana, juga pemberian piagam bagi personel yang berprestasi.

d. Meningkatnya pemenuhan sarpras berbasis teknologi dan informasi.

e. Tersedianya data dan informasi yang handal dan *user friendly*.

f. Terwujudnya *good governance & clean government.*

g. Terkelolanya anggaran yang akuntabel.

h. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif.

Setiap sasaran strategis tersebut kemudian dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Pendukung sebagai ukuran keberhasilannya. Pada table 1 dibawah ini menunjukan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Pendukung, serta Target kinerja yang ditetapkan untuk kurun waktu tahun 2020 – 2024.

Tabel 1. Sasaran Sasaran Strategis, IKU, IKP, dan Target kinerja Thn 2020 – 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1		*2*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
SS 5	Sistem pengawasan yang akuntabel Bersih terbuka dan melayani	IKP 1	Nilai AKIP	75,8	77,3	78,1	83,1	81,5
		IKP 3	Nilai IKPA	75,0	76	76,5	81	95,0

Penetapan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Pendukung, serta Target kinerja yang ditetapkan untuk kurun waktu tahun 2020 – 2024 diatas kemudian dijalankan sesuai dengan yang telah direncanakan dengan capaian seperti yang ditunjukan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Capaian Kinerja Rumkit Bhayangkara Jambi
Tahun 2020 – 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA						
		2020	2021	2022	2023	2024
IKP 1	Nilai AKIP	76	77,5	78,5	83	82
IKP 3						
	Nilai IKPA	76	77	77,5	81,5	95,5

Secara keseluruhan, capaian kinerja tersebut jika dibandingkan dengan penetapan target pada awal periode perencanaan menunjukan bahwa kinerja dari Rumkit Bhayangkara tercapai sedikit melebihi dari target yang ditetapkan walaupun masih terdapat beberapa target yang juga tidak tercapai. Namun, secara keseluruhan angka tersebut sudah menunjukan ketercapaian dari target kinerja yang ditetapkan.

b. Realisasi Capaian Kinerja Rumah Sakit Bhayangkara

Pembangunan Kesehatan dalam skala nasional dihadapkan pada tantangan masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan Kesehatan dan gizi masyarakat, baik kesehatan ibu dan anak, usia sekolah, usia produktif maupun lansia. Pengendalian penyakit dan kapasitas ketahanan kesehatan juga belum optimal. Penyakit menular masih tinggi, penyakit tidak menular terus meningkat, penyakit tropis terabaikan belum dapat dieliminasi, adanya ancaman penyakit berpotensi wabah/kejadian luar biasa, dan perilaku hidup sehat belum membudaya. Selain itu, disparitas kapasitas

sistem kesehatan terjadi di seluruh wilayah yang menyebabkan permasalahan pada kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.

2. Potensi dan Permasalahan

Dinamika perkembangan lingkungan strategis yang cepat, perkembangan teknologi yang pesat dan ancaman-ancaman baru perlu menjadi perhatian penting dalam menentukan arah perencanaan Rumah Sakit untuk lima tahun kedepan. Dinamika perkembangan ini perlu untuk ditinjau dari skala global, skala regional, maupun skala nasional.

Kondisi Global

Dalam The Global Risk Report 2024, survei menunjukan bahwa terdapat 10 hal yang berisiko memicu krisis global, dan sedikit banyak hal ini perlu untuk menjadi pertimbangan dan perlu untuk dikaji dalam menyusun dokumen Renstra Rumkit Bhayangkara Tahun 2025 – 2029 ini.

1) Polarisasi Sosial – Politik

   Salah satu karakteristik regresi demokrasi yang terjadi secara global ialah dunia yang makin terpolarisasi, warga terbelah berdasarkan sikap partisan masing-masing. Sikap partisan ini pada akhirnya menggiring setiap pemilih untuk mengabaikan kebenaran objektif serta membuat emosi dan keyakinan personal dianggap lebih penting jika dibandingkan dengan data dan fakta. Inilah yang kemudian dieksploitasi pemimpin populis untuk menjalankan agenda-agenda illiberal karena sikap partisan pendukung mereka, memungkinkan agenda tokoh populis tadi berjalan sesuai rencana.

2) Krisis Biaya Hidup

Krisis biaya hidup merupakan risiko terbesar dunia yang akan mendominasi selama dua tahun ke depan. Krisis tersebut dipicu peningkatan pengeluaran rumah tangga akibat kenaikan harga pangan dan energi, serta belum pulihnya daya beli masyarakat selama pandemi Covid-19. Sejak akhir tahun 2019 dan kuartal awal tahun 2020, seluruh dunia secara bersama meng-hadapi pandemi COVID-19. Wabah tersebut tentunya menjangkit kesehatan dari perekonomian berbagai negara dan menimbulkan krisis berskala global baru sejak periode 2007–2009. Risiko krisis biaya hidup itu tidak hanya terjadi di beberapa negara maju, tetapi juga di sejumlah negara berpenghasilan menengah dan rendah. Negara-negara itu antara lain Kanada, Inggris, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Bostwana, Pantai Gading, Kamerun, Kostarika, Yuniani, Israel, dan Malaysia.

Pada krisis biaya hidup ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat dengan peng-hasilan menengah ke bawah (*poorer households*) lebih terdampak diband-ingkan masyarakat dengan penghasilan menengah ke atas (*richer house-holds*). Berdasarkan studi, masyarakat menengah ke bawah memiliki kebu-tuhan energi dengan tingkat konsumsi yang cukup besar. Sehingga dengan adanya kenaikan harga energi, akan berdampak lebih signifikan pada alokasi pengeluarannya. Sementara itu, dalam konteks kebutuhan makanan, harga makanan yang cenderung murah di mana kelompok masyarakat ke bawah cenderung bergantung dengan makanan itu– mengalami kenaikan harga yang signifikan. Bagi masyarakat menengah ke atas, kenaikan harga cen-derung dapat dihadapi, namun ini sulit bagi masyarakat menengah ke bawah.

Kondisi ini juga tentunya memengaruhi perilaku masyarakat sebagai konsumen, yakni mereka memilih untuk berbelanja di toko yang menawarkan promosi, membeli substitusi yang lebih murah, bahkan memilih untuk tidak memakan di luar (seperti restoran). Efek dari menabung di masa lalu pun mulai berperan penting di kondisi saat ini sebagai pelengkap disposable income untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akibat dari pandemi, para peker-ja semakin memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan, serta meng-harapkan adanya jam kerja fleksibel. Menghadapi krisis biaya hidup, para pekerja juga terdorong untuk bekerja dengan jam yang lebih lama.

3) Serangan Siber

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mengenai estimasi risiko siber di sektor finansial, estimasi total kerugian rata-rata tahunan yang dialami sektor jasa perbankan secara global yang disebabkan oleh serangan siber adalah mencapai 100 miliar dollar AS atau setara Rp 1.420 triliun (asumsi kurs Rp 14.200 per dollar AS).

4) Penurunan Ekonomi

Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul *"Is a Global Recession Imminent?"* memprediksi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi global pada tahun 2023. Prediksi tersebut, terasa semakin nyata dengan beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi. Penurunan ekonomi ini secara tidak langsung juga pasti akan berdampak kepada sector lainnya, salah satunya adalah sector Kesehatan.

5) Gangguan Rantai Pasokan

Di era globalisasi dan teknlogi canggih ini, global supply chain atau rantai pasokan adalah metode rantai pasok yang banyak digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia. Model rantai pasokan global ini membentuk

jaringan dari berbagai pihak yang terlibat baik produksi, distribusi, dan penjualan produk atau layanan di berbagai negara. Cakupan tahapannya mulai dari pengadaan bahan baku, proses manufaktur, pengiriman, hingga penjualan produk ke konsumen. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai efisiensi dan kecepatan dalam proses bisnis.

Namun ketidakstabilan politik, perubahan regulasi, bencana alam, perubahan iklim, dan lain sebagainya akan mengganggu jalannya rantai pasokan dan berdampak sangat besar bagi seluruh negara-negara dunia.

6) Eskalasi Konflik Negara

Kondisi global terakhir ini dimarakkan dengan konflik Iran dan Israel akan memicu permasalahan global. Kondisi yang semakin memanas akan menyebebkan kenaikan harga minyak bumi, tingginya nilai tukar uang, dan yang paling buruk adalah kondisi ini berpotensi menjatuhkan ekonomi global ke dalam jurang resesi karena ketidakpastian yang menyebabkan investor cenderung *wait and see*.

7) Serangan ke Infrastruktur

Insfrastruktur merupakan hal penting dan mendasar sebagai kebutuhan bagi suatu negara. Hal ini juga menjadi prioritas pembangunan di negara-negara bekembang. Di negara maju, infsrastruktur di bagun dan dilengkapi untuk memudahkan aktifitas di seluruh wilayahnya. Karena pentingnya, maka ada suatu pendapat bahwa, jika ingin menjatuhkan suatu negara, maka hancurkan infrastrukturnya. Kondisi global yang semakin memanas ini, mengakibatkan banyak negara-negara memperkuat persenjataannya, dan merencanakan untuk menyerang infrastruktur negara lain jika terjadi peperangan.

Kondisi Regional

1) Keamanan Siber

Keamanan siber global menjadi salah satu isu keamanan bagi para organisasi. Hal ini dibuktikan melalui suvei yang dilakukan oleh Palo Alto Networks, yang menyebutkan bahwa para pemimpin bisnis di ASEAN sudah memprioritaskan isu keamanan siber sebagai salah satu dampak akibat pandemi Covid-19. Perkembangan teknologi dan sains yang secara masif menyokong hidup manusia saat ini dan sejalan dengan berkembangnya teknologi siber seperti implementasi *Internet of Things* dan teknologi *block chain*, memunculkan efek negatif berupa kejahatan siber. Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan ekosistem digital, penggunaan internet yang semakin besar, serta serangan dan ancaman siber yang juga semakin besar, harus ditangani dengan serius pula.

2) Penyelundupan Narkoba

Kawasan Asia Tenggara memiliki luas area sekitar 4,4 juta KM^2 dan dikenal sebagai wilayah produksi narkotika “Golden Triangle” yang berada di perbatasan Thailand, Laos dan Myanmar. Salah satu negara tujuan penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara adalah Indonesia dan Provinsi Riau merupakan salah satu pintu gerbang masuknya narkotika secara ilegal dari negara lain terutama Malaysia.

3) Ancaman Pandemi

Pandemi Covid 19 yang terjadi beberapa tahun lalu membuat banyak negara-negara meningkatkan kewaspadaannya akan virus atau wabah penyakit yang sedang beredar agar tidak masuk secara massif di negaranya. Akhir-akhir ini sering diberitakan bahwa merebaknya wabah penyakit cacar monyet. Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi banyak negara berkembang yang bahkan belum benar-benar pulih dari dampak pandemi Covid kemarin.

Kondisi Nasional

1) Pandemi Covid -19

Pasca Pandemi Covid memberi dampak ke berbagai aspek bukan hanya Kesehatan namun juga berdampak kepada aspek ekonomi. Selain itu ancaman keamanan terus berkembang dan muncul dalam bentuk baru di

masa pandemik ini. Indonesia perlu terus berkembang dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang akan dihadapi kedepannya.

2) Konflik Suku, Agama, RAS dan Antargolongan

Tantangan besar Indonesia khususnya pada tahun politik adalah maraknya hoaks dan ujaran kebencian, terutama yang bermuatan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Selain hoaks, tantangan besar yang dihadapi di tahun politik adalah merebaknya ujaran kebencian emalalui media sosial. Menengarai hoaks masif disebarkan bukan hanya karena rendahnya literasi digital masyarakat, namun juga karena fanatisme politik yang berlebihan. Semua itu berujung pada pudarnya kerukunan, menguatnya polarisasi, meningkatnya kebencian antar golongan, dan menurunnya kemanusiaan.

3) Separatisme Papua

Separatisme Papua juga menjadi salah satu ancaman yang dapat menciptakan disintegrasi bangsa. Tercatat pada tahun 2021 terdapat 92 aksi teror yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua. Kelompok separatisme terindikasi menjadi salah satu sumber konflik dan menghambat pembangunan di Papua. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara dari segala ancaman yang ingin merusak tatanan kehidupan NKRI, salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah melakukan kontra propaganda atas propaganda yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua.

4) Radikalisme

Maraknya gerakan radikalisme yang merebak di tanah air tentunya mengkhawatikan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Penyebaran hoax tanpa filter melalui sosial media membuat paham radikal makin subur. Persoalan saat ini adalah adanya gerakan-gerakan radikalisme

yang memiliki agenda terselubung yang menggerogoti sendi-sendi negara yang ingin memecah belah bangsa Indonesia, melemahkan persatuan dan kesatuan merusak kebhinekaan yang sejak Indonesia berdiri telah menjadi konsensus bersama.

5) Serangan Siber

Pada tahun 2009 telah dilaporkan terdapat 290 juta kasus serangan siber. Dimana jumlah tersebut 25% lebih banyak dari tahun sebelumnya yang menyebabkan kerugian sekitar US$ 34,2 miliar di Indonesia. Sedangkan Kemkominfo menyebutkan bahwa terdapat 5.000 laporan pengaduan Tindakan penipuan tiap minggunya. Sejak Maret hingga Oktober tahun 2020 tercatat sebanyak 200.000 laporan pengaduan diterima melalui Whatsapp dan Instagram. Statistik tersebut menunjukkan Indonesia sudah dalam situasi darurat kejahatan siber.

6) Human Trafficking

Kasus perdagangan orang di Indonesia saat ini masih mengalami peningkatan. Korban perdagangan orang terjadi pada perempuan, anak, dan laki-laki. Bila di lihat dari jumlah perempuan dan anak-anak yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), SIMFONI PPPA menyebutkan bahwa terdapat peningkatan angka korban sebanyak 62,5 pesen pada tahun 2020. Sedangkan Kemenlu melaporkan telah mengidentifikasi 259 kasus perdagangan orang pada tahun 2019 (tercatat164 kasus pada 2018, 340 kasus pada 2017, dan 478 kasus pada 2016). Jumlah ini termasuk 228 pekerja rumah tangga dan 31 yang bidang pekerjaannya tidak dilaporkan. Pemerintah perlu terus melakukan peningkatan upaya-upaya dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia.

7) *Penyelundupan* Narkoba

Upaya penyelundupan narkotika masih marak terjadi pada tahun 2022. Dalam kurun waktu 3 bulan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Bersama dengan Polri telah berhasil mengungkap sebanyak 20 kasus upaya penyundupan Narkotika dengan barang bukti sebanyak 1,2 ton. Penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia dilakukan dengan menggunakan jalur laut disepanjang garis Pantai perbatasan Provinsi Riau dan Malaysia. Jalur penyelundupan perairan laut ini dipilih dikarenakan beberapa faktor yaitu: jarak wilayah perairan yang dekat, banyaknya pelabuhan tidak resmi atau ilegal, minimnya patroli pengawasan di sepanjang wilayah perairan serta faktor profesionalitas aparat penegak hukum di wilayah perbatasan.

3. Analisis SWOT

Berdasarkan poin-poin kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dilakukan analisis yang kemudian menghasilkan strategi yang dapat diimplementasikan oleh Polda Jambi. Strategi-strategi tersebut adalah ***Strategi S-O,*** strategi W-O, strategi S-T, dan strategi W-T.

Berdasarkan poin-poin kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dilakukan analisis yang kemudian menghasilkan strategi yang dapat diimplementasikan oleh Polri. Strategi-strategi tersebut adalah ***Strategi S-O***, strategi W-O, strategi S-T, dan strategi W-T.

Strategi S-O merupakan strategi yang dibuat dengan memanfaatkan kekuatan (*strengths*) internal yang dimiliki Polri guna mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) eksternal yang ada. ***Strategi S-O*** tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Penguatan fungsi intelijen untuk secara preemptif dan preventif menanggulangi ganguan Kamtibmas;
b. penguatan kompetensi dan kapabilitas TI Polda Jambi;
c. peningkatan kompetensi berbasis nilai-nilai “Tribrata” dan “Catur Satya” bagi setiap personel Polda Jambi;
d. optimalisasi kegiatan dan operasi Kamtibmas di lokasi rawan, bencana, wabah, dan ataupun lokasi strategis di Provinsi Jambi;

e. penjagaan dan pemeliharaan Kamtibmas secara humanis dan berkeadilan.

Strategi S-T merupakan strategi yang disusun guna memanfaatkan kekuatan (strengths) yang dimiliki Polri untuk menghadapi ancaman (threats) yang berasal dari lingkungan eksternal Polri. ***Strategi S-T*** tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. penguatan sinergisitas dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan;
b. penguatan fungsi satuan kewilayahan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan bagi masyarakat serta di daerah terpencil dan terjauh dengan pemolisian komunitas/community policing;
c. sosialisasi dan internalisasi kesadaran Kamtibmas ke seluruh Provinsi Jambi;
d. mendorong keterlibatan peran aktif anggota Polda Jambi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
e. optimalisasi penjagaan dan penguatan citra positif Polda Jambi demi penjagaan Kamtibmas.

Strategi ***W-O*** merupakan strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (weaknesses) internal Polri untuk mengambil keuntungan dari peluang (opportunities) eksternal yang ada. ***Strategi W-O*** tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. pengembangan sistem manajemen berbasis data secara optimal;
b. penguatan sistem manajemen dan tata kelola organisasi;
c. pengembangan modal sosial Polda Jambi dalam penjagaan dan pemeliharaan Kamtibmas;
d. optimalisasi daya guna sumber daya fisik (sarana, prasarana dan infrastruktur) Polda Jambi;
e. harmonisasi cipta kondisi di dunia digital untuk mendukung Kamtibmas di masyarakat.

Strategi W-T merupakan strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (*weaknesses*) internal Polri untuk menghadapi ancaman (*threats*) yang berasal dari lingkungan eksternal Polri. ***Strategi W-T*** tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. harmonisasi regulasi dan kebijakan demi efektivitas dan efisiensi kinerja Polda Jambi;
b. meningkatkan kualitas dan iklim kerja di lingkungan Polda Jambi;
c. optimalisasi pemeliharaan dan perawatan SDM Polda Jambi dalam segala dimensi (fisik, mental, dan spiritual);
d. peningkatan kualitas serta dampak program dan kegiatan Polda Jambi;
e. peningkatan kualitas serta jangkauan di semua unit pelayanan dan SDM Polda Jambi hingga ke wilayah terjauh dan terpencil;
f. rasionalisasi dan idealisasi struktur serta komposisi proporsi personel Polda Jambi.

a. Potensi Ancaman

Berdasarkan kondisi global, regional, serta nasional tersebut, maka beberapa hal yang perlu penekanan dan menjadi perhatian penting yaitu:

Ancaman terkait Harkamtibas:

1) Perkembangan teknologi dan teknologi informasi menjadi ancaman bagi keamanan dan ketertiban dalam negeri.

2) Insurjensi masih menjadi ancaman serius bagi keamanan dalam negeri.

3) Konflik internal termasuk konflik social masih menjadi ancaman bagi keamanan dalam negeri

4) Disrupsi teknologi menjadi ancaman yang perlu diantisipasi demi keamanan dalam negeri.

Ancaman terkait sector kesehatan

1) Rendahnya cakupan pelayanan Kesehatan dan gizi masyarakat.

2) Pengendalian penyakit dan kapasitas ketahanan Kesehatan masih belum optimal.

3) Penyakit menular masih tinggi, penyakit tidak menular terus meningkat, penyakit tropis terabaikan belum dapat dieliminasi, adanya ancaman penyakit berpotensi wabah/kejadian luar biasa, dan perilaku hidup sehat belum membudaya.

b. Potensi Kekuatan

Selain dari ancaman tersebut diatas, perkembangan lingkungan global, regional, dan nasional juga memberikan beragam potensi yang dapat menjadi factor penguat dalam menjalankan fungsinya, antara lain:

1) Rumkit Bhayangkara memiliki laboratorium yang disertai dengan peralatan penunjang kegiatan di laboratorium yang handal guna mendukung tugas pokok dan fungsi Polri.

2) Bentuk organisasi dan kelembagaan Rumkit Bhayangkara sekarang ini memungkinkan Rumkit untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan dalam hal pelayanan dalam pengobatan dan perawatan pasien.

3) Rumah Sakit Bhayangkara sebagai unit yang memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, dalam tata Kelola keuangannya telah berbentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang memungkinkan Rumah Sakit Bhayangkara dapat menjalankan pelayannannya secara optimal.

c. Permasalahan

Berdasarkan kondisi umum diatas, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi Rumkit bhayangkara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain:

1) Reorganisasi Rumkit Bhayangkara masih belum diikuti oleh penyesuaian nivelering bagi pejabat strukural, hal ini menunjukan ketimpangan antara jabatan dan pangkat serta golongan karena tidak berimbang.
2) Fasilitas kesehatan Rumkit Bhayangkara masih ada yang belum bekerjasama dengan BPJS, hal ini mengakibatkan kendala pada saat melakukan akreditasi karena akreditasi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) atau rumah sakit Bhayangkara menjadi syarat wajib untuk bisa bekerja sama dengan BPJS.

3) Kegiatan kuratif seperti Kegiatan perawatan pasien anggota dan keluarga serta Masyarakat umum.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Oleh karena itu, Visi dirumuskan dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

a. Visi mendukung pencapaian visi Polri serta Visi Presiden sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN

b. Visi juga harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi

c. Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi

d. Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami.

e. Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat

f. Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian

g. Visi harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel.

1.1 Visi Polri

Polri menetapkan Visi untuk Renstra Polri Tahun 2025 – 2029, yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang aman, tertib, dan berkeadilan, melalui kepolisian yang berorientasi pada masyarakat”.

Makna dari visi Polri tersebut yaitu:

Visi Polri menunjukan aspirasi yang ingin diwujudkan di 2029, sejalan dengan pentahapan Grand Strategy Polri 2025 – 2045. Penguatan fondasi organisasi Polri diharapkan dapat memberikan dampak pada kondisi nasional, yakni Indonesia Maju.

Indonesia Maju akan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, apabila hal itu dicapai dengan aman, tertib, dan berkeadilan. Aman tertib refleksi dari penurunan kasus-kasus criminal dalam segala bentuknya. Sedangkan berkeadilan menunjukan hasil dari upaya penegakan hukum yang mengedepankan prinsip "*equity before the law*".

1.2 Visi Pusdokkes Polri

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut diatas serta berdasarkan Visi Polri, maka

Visi Pusdokkes Polri adalah:

"Pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian yang prima menuju Kepolisian yang berorientasi pada masyarakat".

1.3 Visi Polda

"Terwujudnya Jambi Maju yang aman, tertib dan berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat".

Mengacu kepada beberapa pengertian di atas, maka Polda Jambi menetapkan visi organisasi sampai dengan tahun 2029, yaitu: **"Terwujudnya Jambi Maju yang aman, tertib dan berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat".** Penjelasan kata-kata kunci dari kalimat visi tersebut mengandung beberapa makna, yakni: Jambi menjadi daerah yang maju, aman dan tertib dan Jambi menjadi daerah yang menegakan hukum secara berkeadilan melalui Kepolisian yang berorientasi pada Masyarakat.

1.4 Visi Rumkit Bhayangkara Jambi

"Terwujudnya Rumah Sakit Bhayangkara Jambi yang Profesional Modern dan Terpercaya dalam memberikan Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Kedokteran Kepolisian".

2. Misi

Misi merupakan gambaran mengenai rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Oleh karena itu, Misi dirumuskan dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

a. Misi harus dapat menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas yang dibebankan oleh Undang-Undang terkait.
b. Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian Visi Pusdokkes Polri
c. Misi berlaku pada periode tertentu

d. Misi harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Pusdokkes Polri atau bersifat unik terhadap Satker Polri lainnya

e. Misi harus dapat menjembatani penjabaran Visi Pusdokkes Polri ke dalam tujuan Pusdokkes Polri.

2.1 Misi Polri

Polri menetapkan Misi untuk Renstra Polri Tahun 2025 – 2029, yaitu:
"Melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat"
Makna dari Misi Polri tersebut yaitu:

Polri berperan dalam melindungi warga negara dari berbagai ancaman, baik itu kejahatan, bencana alam, atau situasi darurat lainnya. Tugas ini mencakup pencegahan kejahatan, penegakkan hukum, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Polri harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yakni memberikan bantuan dalam situasi darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa hak-hak warga dihormati dan dilindungi. Polri diharapkan untuk bersikap ramah, responsive, dan professional dalam setiap interaksi dengan masyarakat.

Mengayomi berarti dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, Polri melakukannya dengan cara yang penuh perhatian dan empati. Dengan mengayomi, Polri berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya dengan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.

2.2 Misi Pusdokkes Polri

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut diatas, maka Misi Pusdokkes Polri adalah:

"Menyelenggarakan kedokteran kepolisian untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri serta pelayanan kesehatan kepolisian secara profesional, modern, dan akuntabel".

2.3 Misi Polda

"Melindungi, melayani dan mengayomi Masyarakat"

Mengacu pada beberapa pengertian di atas maka Polri menetapkan misi organisasi sampai dengan tahun 2029, yaitu: "Melindungi, melayani dan mengayomi Masyarakat" dalam mewujudkan visi Polda Jambi, maka 3 (tiga) hal inilah yang harus dilakukan. Oleh karena itu, misi Polda Jambi tersebut memiliki makna sebagai berikut:

Melindungi… Dalam hal melindungi, banyak hal yang harus memerlukan perlindungan. Tetapi Polri bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, Masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menamin tercapainya lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Melayani… Melayani kepentingan Masyarakat di seluruh Jambi, memberikan pelayanan kepada Masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Mengayomi… Polisi selalu berusaha untuk memberikan contoh yang terbaik pada Masyarakat, agar Masyarakat bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jika yang sudah dilakukan oleh seorang polisi semaksimal mungkin dari kemauan Masyarakat itu sendiri kurang, maka akan percuma saja apa-apa saja yang telah dilakukan oleh seorang polisi. dan masyarakat akan terus berfikir bahwa serang polisi tidak bisa mengayomi masyarakat. Dan Masyarakat akan terus berfikir bahwa seorang polisi tidak bisa mengayomi Masyarakat.

misi …

2.4 Misi Rumkit Jambi

a) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pasien;
b) Melaksanakan dukungan kedokteran kepolisian yang profesional dalam rangka menunjang Tugas Pokok Kepolisian;
c) Meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan kesejahteraan personil;
d) Mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

3. Tujuan

Tujuan merupakan gambaran Visi dan Misi dan dilengkapi dengan rencana sasaran dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas. Oleh karena itu, Tujuan dirumuskan dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

a. Tujuan harus sejalan dengan Visi dan Misi Pusdokkes Polri pada periode jangka menengah;
b. Tujuan harus dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menegah;
c. Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Pusdokkes Polri;
d. Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Pusdokkes Polri.

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut diatas, maka Tujuan Pusdokkes Polri adalah:

a. Mewujudkan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian yang modern dan berstadar internasional;
b. Menyelenggarakan dan melaksanakan Pelayanan Kesehatan yang prima;

c. Manerapkan manajemen Dokkes Polri yang akuntabel dan berintegritas serta agile dan modern.

3.1 Tujuan Polda

Adapun tujuan Polda Jambi yang akan dituju pada tahun 2029 adalah:

a. meningkatnya pelayanan penegakan hukum yang mengutamakan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, inklusivitas dan profesionalisme;
b. menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif;
c. meningkatnya kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polda Jambi agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolan dan pengembangan SDM Polda Jambi yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;
d. tersedianya infrastruktur dan peralatan strategis yang mendukung operasional kepolisian, pemeliharaan Kamtibmas, pelayanan publik serta penegakan hukum yang berkualitas, profesional, efektif, mudah diakses dan inklusif;
e. memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kepolisian Daerah Jambi.

3.2 Tujuan Rumkit Bhayangkara

a. Terselenggaranya fungsi pelayanan kesehatan secara prima dan universal demi terciptanya derajat kesehatan masyarakat Polri yang paripurna`;
b. Terwujudnya pemberdayaan dan pengembangan SDM melalui upaya peningkatan kemampuan dalam bentuk pelatihan, seminar, lokakarya, workshop dan pendidikan berkelanjutan;
c. Pemenuhan sarana prasarana terutama alat kesehatan (alkes) dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang telah

ditetapkan sesuai standar Rumah Sakit tingkat II atau kelas C;

d. Pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana operasional dalam rangka peningkatan performa fisik bangunan Rumkit Bhayangkara Jambi yang lebih representatif;

e. Tergelarnya dukungan operasional kepolisian dalam rangka menunjang tugas – tugas pokok kepolisian, yang meliputi kegiatan pemeriksaan visum et repertum, pelayanan PPT, pelayanan tahanan, deteksi dini narkoba dan kesehatan lapangan (keslap).

4. Sasaran Strategis

4.1 Sasaran Strategis Polda

Adapun Sasaran Strategis Polri Tahun 2025-2029 adalah:

a. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
b. Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan;
c. Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh;
d. Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya guna dan Modern;
e. Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Pusdokkes Polri yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Oleh karena itu, Sasaran Strategis Pusdokkes Polri dirumuskan dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis Pusdokkes Polri merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan Pusdokkes Polri
b. Sasaran strategis mencerminkan berfungsinya outcomes dari Program yang ada di Pusdokkes Polri
c. Sasaran strategis dapat dirumuskan dengan nomenklatur yang sama dengan sasaran strategis pada Renstra Polri 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdokkes Polri, atau dirumuskan langsung dengan

nomenklatur yang menggambarkan dukungan secara langsung/sejalan terhadap pencapaian sasaran Polri dengan tetap mengacu kepada Visi, Misi dan tugas serta fungsi Pusdokkes Polri.

d. Sasaran Strategis yang dirumuskan memiliki sebab akibat (causality) secara logis dengan sasaran strategis dalam Renstra Polri.

e. Sasaran strategis perlu memiliki keterkaitan dan hubungan sebab akibat dengan Sasaran Program.

f. Sasaran Strategis harus dirumuskan secara jelas dan terukur

g. Sasaran Strategis harus dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis berserta target kinerja

h. Indikator Kinerja Sasaran Strategis merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Pusdokkes Polri

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut diatas, maka Sasaran Strategis Pusdokkes Polri adalah:

a. Terwujudnya pelayanan kedokteran dan kesehatan kepolisian yang modern dan Paripurna, berstandar internasional untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri;
b. Terselenggaranya pelayanan kedokteran kepolisian yang berstandar internasional;
c. Terselenggaranya pelayanan Kesehatan yang paripurna, bermutu dan merata sampai ke wilayah;
d. Terselenggaranya layanan laboratorium kedokteran Kesehatan kepolisian berdasarkan standar ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. Terwujudnya pengelolaan SDM Dokkes Polri yang mandiri, profesional dan kompeten;
f. Terwujudnya almatsus, perbekalan dan fasilitas Dokkes Polri yang modern dan memadai sesuai kebutuhan;
g. Terwujudnya perencanaan Dokkes Polri yang efektif, efisien dan akuntabel;
h. Terwujudnya organisasi Dokkes Polri yang rasional, *agile* dan modern.

4.2 Sasaran Strategis Rumkit Bhayangkara

a. menjadikan Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi sebagai relationship / mitra bagi pelayanan BPJS kesehatan;
b. meningkatnya daya saing dan jumlah kunjungan pasien ke Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, melengkapi Alkes secara bertahap dan membentuk tim promosi yang produktif serta membentuk pelayanan unggulan Rumkit (PPT / Pusat Pelayanan Terpadu);
c. terbangunnya budaya melayani yang berorientasi pada kepuasan dan kenyamanan pelanggan / budaya pelayanan prima, sehingga tingkat kepercayaan terhadap Rumah Sakit Bhayangkara Jambi menjadi lebih baik;

d. tersosialisasinya standar-standar pelayanan operasional (SPO) pada bidang pelayanan medis, penunjang medis, administrasi, rekam medis maupun fasilitas lainnya yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;
e. penyelenggaraan upaya kesehatan preventif, kuratif dan rehabilitatif guna memelihara dan meningkatkan serta mewujudkan kondisi fisik dan psikis yang sehat samapta bagi personil Polda Jambi;
f. diselenggarakannya kegiatan pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit Bhayangkara Jambi berdasarkan versi terbaru SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit);
g. terselenggaranya pengelolaan seluruh sumber daya Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi secara efektif, efisien dan akuntabel;
h. terbangunnya sistem informasi rumah sakit yang ter update dengan mengedepankan sistem Informatika dan Teknologi (IT) dan SIM RS yang modern;
i. terlaksananya sistem pengelolaan keuangan BLU yang trasparan, akuntabel dan profesional.

5. Hubungan Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan Sasaran Strategis haruslah memiliki keterkaitan, karena Sasaran Strategis merupakan merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan Pusdokkes Polri. Oleh karena itu, hubunga keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Strategis dalam Renstra Pusdokkes Polri Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Hubungan Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Sasaran Strategis

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif;	1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang responsif dan prediktif;
2. meningkatnya pelayanan penegakan hukum yang mengutamakan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, inklusivitas dan profesionalisme;	2. penegakan hukum yang humanis, akuntabel dan berkeadilan;
3. meningkatnya kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polda Jambi agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolan dan pengembangan SDM Polda Jambi yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;	3. pengembangan dan pengelolaan SDM Polda Jambi yang kompeten, berintegritas dan adaptif secara terpadu dan menyeluruh;
4. tersedianya infrastruktur dan peralatan strategis yang mendukung operasional kepolisian, pemeliharaan Kamtibmas, pelayanan publik serta penegakan hukum yang berkualitas, profesional, efektif, mudah diakses dan inklusif;	4. infrastruktur strategis kepolisian yang berdaya guna dan modern;
5. memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kepolisian Daerah Jambi.	5. tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

5.2 Hubungan Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Sasaran Strategis RS Bhayangkara

Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya RS Bhayangkara Jambi yang profesional modern dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kesehatan dan dukungan Kedokteran Kepolisian	SS 5 Tata Kelola yang bersih, transparan dan akuntabel.

6.1 Penahapan Kebijakan Polda

a. Tahun 2025

Menyempurnakan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja menjadikan organisasi dan SDM Polda Jambi yang adaptif, kompeten dan berintegritas;

b. Tahun 2026

Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam Yanlik Polda Jambi yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang efektif, efisien dan terukur berbasis T.I serta didukung Almatsus Polda Jambi yang modern;

c. Tahun 2027

Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam Yanlik Polda Jambi yang berorientasi pada kepercayaan masyarakat guna menjadikan organisasi dan SDM Polda Jambi yang adaptif, kompeten dan berintegritas;

d. Tahun 2028

Mewujudkan pelayanan publik kepolisian yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat, serta percepatan akuntabilitas kinerja birokrasi Polda Jambi dan budaya kerja Polda Jambi yang jelas, efektif dan efisien yang berbasis T.I menjadikan organisasi dan SDM Polda Jambi yang adaptif, kompeten dan berintegritas serta Sejahtera;

e. Tahun 2029

Inovasi layanan publik kepolisian yang professional dan berbasis T.I dalam rangka memudahkan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menggunakan *platform* layanan kepolisian.

6.2 Penetapan Kebijakan RS Bhayangkara

a. Pada tahun 2025

Meningkatkan mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan kaidah akreditasi. dan melakukan outsouching untuk pemeliharaan kebersihan gedung untuk optimalisasi bagi karyawan rumkit serta bagi pasien dan keluarga.

b. Pada tahun 2026

Melanjutkan kualitas pelayanan pasien yang berbasis mutu dan keselamatan pasien

c. Pada tahun 2027

Tetap mempertahankan akreditasi rumah sakit yang Paripurna.

d. Pada tahun 2028

Mempersiapkan dan memantapkan terwujudnya pelayanan rumah sakit sesuai standar Rumah Sakit Tipe B.

e. Pada tahun 2029

Terwujudnya pelayanan rumah sakit sesuai standar Rumah Sakit Tipe B.

Hubungan keterkaitan Sasaran Impact “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”,Tujuan,danSasaranStrategis.

LAMPIRAN KEP KARUMKIT JAMBI
NOMOR : KEP/ 9 / VIII /2025
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2025

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polri

a. Sasaran Prioritas I “Memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia Secara Proaktif”, terdiri dari 12 (dua belas) arah bijak sebagai berikut:

1) arah bijak: meningkatkan kinerja Polri dalam melaksanakan deteksi aksi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan kemampuan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini dari fungsi intelijen keamanan Polri melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen yang mampu mendukung operasional fungsi kepolisian baik terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata serta menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial di tengah masyarakat;

b) melakukan penyelidikan dengan fokus pada potensi terjadinya Tindak Pidana Terorisme, ancaman aksi radikalisme dan pemetaannya;

c) penguatan program Polmas guna mengoptimalkan penggelaran satu Bhabinkamtibmas untuk satu desa/kelurahan dalam mendukung Harkamtibmas;

d) meningkatkan kualitas hasil penelitian dan survei yang akuntabel dalam rangka mendukung pengukuran Indeks Kamtibmas Polri;

2) arah bijak: menurunkan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang proaktif;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan sambang serta optimal dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam memberikan konsultan dalam pemecahan masalah yang terjadi di tengah masyarakat;
b) melakukan kegiatan pencegahan berupa: kontra radikal, kontra narasi dan kontra ideologi terhadap penyebaran propaganda kelompok terorisme baik pada kanal-kanal media *online* maupun komunitas masyarakat yang rentan terpapar oleh paham radikalisme dan terorisme;
c) meningkatkan pelibatan peran *civil society* dan tokoh agama yang *Igaras* dan yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme;
d) melaksanakan sosialisasi dan kolaborasi dengan *"stakeholder"* dalam upaya pencegahan paham radikalisme, terorisme dan melaksanakan pembinaan terhadap para eks napi terorisme beserta keluarganya;
e) menetralisir informasi negatif di tengah masyarakat yang dapat mengganggu Kamtibmas dengan mengelola opini publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
f) melaksanakan *"edukasi"* dan imbauan kepada masyarakat berupa pesan Kamtibmas untuk pencegahan kejahatan termasuk bahaya perjudian, TPPO dan Penyelundupan Barang Ilegal melalui produksi konten kreatif, melaksanakan *press release* tentang Kamtibmas dengan tujuan meningkatkan citra positif terhadap Polri;
g) meningkatkan kegiatan Patroli di wilayah rawan kejahatan termasuk bahaya perjudian, TPPO dan Penyelundupan Barang Ilegal serta

melaksanakan pelacakan dan penangkalan di tempat Obvit/Obvitnas dan destinasi pariwisata;

3) arah bijak: mengoptimalkan kegiatan *"Pemolisian Prediktif" dalam rangka Harkamtibmas* guna menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat *(Cooling System)* dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat*;*

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang kepada Toda, Toga dan Tomas serta masyarakat lainnya termasuk dari bahaya perjudian, penyelundupan manusia dan barang ilegal;
b) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan fungsi kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus;
c) pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan Polmas dan asistensi bagi penguatan KBPPP;
d) melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas kepada masyarakat pengguna jalan;

4) arah bijak: mengedepankan penanganan konflik secara humanis; untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) mengedepankan peran dari para Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis;
b) mengorganisasikan kegiatan masyarakat untuk mengalihkan potensi konflik sosial/politik dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang positif.
c) penggelaran pasukan Korbrimob Polri dalam pengamanan konflik dilakukan secara humanis pada saat dan pascakonflik;

5) arah bijak: meningkatkan Kamseltibcarlantas bagi masyarakat guna memberikan rasa aman saat terjadi kemacetan dan saat jam rawan kejahatan;

untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di tengah masyarakat;
b) meningkatkan kegiatan patroli, penjagaan di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan kejahatan serta berperan aktif mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas;
c) meningkatkan kegiatan patroli dan penjagaan di Obvit/Obvitnas dan tempat destinasi pariwisata saat jam-jam rawan dalam rangka mendukung "*Pertumbuhan Ekonomi"* serta berperan aktif di tengah masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;

6) arah bijak: meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa, bencana dan *"Slum Area"*;

untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) personel Brimob Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi *"ketanggapsegeraan"* dalam penanggulangan bencana, keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan kriminalitas yang berintensitas tinggi, bencana (SAR) serta wabah;
b) menyelenggarakan dan mendukung pelayanan bantuan penanganan SAR terbatas dalam penanggulangan bencana dan keselamatan yang dilaksanakan oleh personel Sabhara, Brimob dan bantuan Satwa;
c) memetakan Desa/wilayah rawan gempa, bencana dan Banjir oleh "*Bhabinkamtibmas"* yang wilayah didiami oleh masyarakat guna

memudahkan identifikasi masyarakat yang terkena saat dan pascabencana;

d) bersama instansi terkait bekerja sama dalam penanganan *"pelayanan Kesehatan"* dan *"trauma healling"* pada daerah rawan gempa dan bencana;

7) arah bijak: melaksanakan kegiatan pengamanan *event* nasional/ internasional serta pembangunan Ibu Kota Nusantara tahun 2025;

untuk mewujudkan arah bijak 7, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan intensitas tinggi serta mengoptimalkan penggunaan kekuatan Brimob Polri dan fungsi Kepolisian lainnya yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pembangunan IKN serta saat berlangsung *event* nasional/internasional berlangsung;

b) melaksanakan pengamanan *event* nasional PON XXI tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan, Festival Olahraga Nasional (Fornas) di NTB, Pameran Dagang Nasional, Festival Budaya Nasional/Nusantara, Cap Go Meh;

c) melaksanakan operasi kepolisian dan kegiatan pengamanan masyarakat pada *event* internasional meliputi: KTT, ASEAN, *Multilateral Naval Exercise (MNE)* Komodo, Sail Cendrawasih, Motto GP/WSBK Mandalika 2025, Kejuaraan Dunia Bola Voli 2025, Marathon Bali 2025, Piala Dunia U-20 2025, Pam *F-1 H-20 Power Boat* Sumut 2025 dan Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025;

d) melaksanakan pengamanan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur;

8) arah bijak: melaksanakan "*back up"* kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergisitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan;

untuk mewujudkan arah bijak 8, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) mengoordinasikan kesiapan personel Polri agar mampu digerakan secara cepat dalam rangka *back up* pengamanan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah rawan konflik;
b) membangun kerja sama dan sinergisitas dengan satuan kewilayahan serta para pemangku kepentingan *(stakeholder)* secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban dalam negeri yang kondusif;
c) melaksanakan *back up* pengamanan kegiatan di tengah masyarakat yang sedang beraktivitas;
d) melaksanakan *back up* kegiatan pengamanan di kawasan Obvitnas dan objek tertentu;
e) melaksanakan kegiatan *back up* pelayanan pelacakan dan penangkalan di daerah rawan kejahatan dan bahaya Narkoba;

9) arah bijak: meningkatkan kerja sama Kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum;

untuk mewujudkan arah bijak 9, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melaksanakan kerja sama dalam negeri antara Polri dan Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan sinergi dengan "*stakeholder"* terkait;
b) meningkatkan kerja sama internasional guna mendukung kerja sama Kepolisian Internasional, Organisasi Internasional dan kerja sama bilateral serta multilateral dalam pemeliharaan keamanan

dan ketertiban dunia untuk meningkatkan citra positif Polri/ Indonesia di mata internasional;

c) meningkatkan kerja sama keamanan dan ketertiban internasional serta di wilayah perbatasan NKRI;

10) arah bijak: melaksanakan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung kegiatan keamanan laut;

untuk mewujudkan arah bijak 10, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan kegiatan patroli kapal Polri dan "*back up"* di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum*;*

b) melaksanakan *"back up"* patroli dari udara dengan mobilisasi pesawat udara Polri dalam rangka pemantauan wilayah perairan yang rawan kejahatan;

11) arah bijak: mendukung kegiatan tahapan pengamanan *event* nasional/ internasional tahun 2025;

untuk mewujudkan arah bijak 11, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melaksanakan kegiatan pengamanan nasional/internasional tahun 2025 meliputi: Pengaturan, Patroli, Penjagaan, Pengawalan;

b) menyelenggarakan pengamanan objek vital dilokasi *event*;

c) melaksanakan pengamanan *event* nasional tahun 2025 serta mengantisipasi meningkatnya kejahatan yang berskala ke intensitas tinggi;

d) melaksanakan perencanaan operasi kepolisian dalam rangka pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2025;

12) arah bijak: meningkatkan penguatan Polri dalam pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni;

untuk mewujudkan arah bijak 12, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) membangun kolaborasi operasional Polri bersama K/L terkait dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan pengawasan (*pre-emtif, preventif* dan melakukan *penegakan hukum*) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik darat maupun laut;

b) melaksanakan dan mengoptimalkan kegiatan patroli, penjagaan dan pelacakan di wilayah rawan kejahatan serta Obvit/Obvitnas serta penguatan Polri di perbatasan dan pulau berpenghuni;

b. Sasaran Prioritas II **"**Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yang semakin Inovatif Berbasis Digital***"***, terdiri dari 3 (tiga) arah bijak sebagai berikut:

1) arah bijak: mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia pada sentra pelayanan publik Polri yang berbasis TIK;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) peningkatan pelayanan *Online* yang terintegrasi serta pelayanan keliling di bidang lalu lintas yang lebih menjangkau masyarakat serta pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian;

b) mengoptimalkan kegiatan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor;

c) melakukan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal di lokasi *afirmatif* (menguatkan) di kawasan perbatasan;

d) melakukan *update* informasi dan dokumentasi pada layanan/ laman *website humaspolri.go.id* secara berkala;

2) arah bijak: meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan inovasi dan perbaikan pelayanan intelkam dan optimalisasi sistem pelayanan SKCK *online;*

b) melaksanakan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Dokkes jajaran;

c) mengoptimalkan proses integrasi *Binmas Online System (BOS)* V2 dengan *Online Single Submission (OSS)* dalam penerbitan surat ijin operasional BUJP;

3) arah bijak: mengoptimalkan *"ketanggapsegeraan"* dalam melayani masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melanjutkan, melaksanakan Monev dan terus mengkaji guna merespons aturan/SOP dipelayanan publik yang berbelit-belit;

b) mengoptimalkan "*Respons Time"* dalam memberikan bantuan teknis Satwa dalam melakukan pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban;

c) meningkatkan dan merespons pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu melalui pembinaan teknis (supervisi, asistensi, verifikasi) dan audit;

c. Sasaran Prioritas III "Menegakkan Hukum secara Adil, Transparan, Legal, Humanis dan Setara*"* terdiri dari 4 (empat) arah bijak sebagai berikut:

1) Arah bijak: mengedepankan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 11 (sebelas) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Indonesia;
b) melakukan penyelidikan terhadap ancaman tindak pidana terorisme, dan penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme berdasarkan penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;*
c) meningkatkan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana Korupsi (pencegahan dan *asset recovery*), Narkoba (TPPU), Perjudian, Terorisme, Karhutla/LH serta Siber termasuk kejahatan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
d) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan perekonomian di bidang pangan, pertanahan, energi, investasi/ perbankan (sektor keuangan);
e) melaksanakan penindakan tindak pidana di perairan dan *"choke point"* dalam mendukung kegiatan keamanan laut;
f) melaksanakan penanganan/penindakan tindak pidana dan pelanggaran Lalu Lintas dalam rangka mewujudkan *"Road Safety"* serta penegakkan hukum melalui *"ETLE"* dan tilang manual;

g) melanjutkan pelaksanaan penyelesaian perkara melalui "*Restorative Justice"* yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan;

h) penanganan kejahatan di ruang siber *(cybercrime)* termasuk bahaya perjudian yang mengedepankan kualitas serta mengedukasi masyarakat;

i) melaksanakan penindakan hukum terbatas/tipiring dalam Harkamtibmas;

j) mempercepat penyelesaian perkara yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat;

k) memberikan bantuan teknis penyidikan dalam rangka pengolahan TKP dan pemeriksaan Barang Bukti.

2) arah bijak: melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik di *era 5.0*;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;

b) meningkatkan kualitas dan kemampuan pemeriksa baik *Labfor* dan *Inafis* dalam pengelolaan TKP untuk membuat terang perkara;

3) arah bijak: mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) senantiasa memberikan *SP2HP2* kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir *komplain* dari masyarakat kepada

Polri di bidang penegakan hukum dan menjunjung tinggi HAM sebagai bentuk pelayanan kepada pelapor/korban dan tersangka;

b) mengoptimalkan peran *"Waskat"* atasan penyidik dan peran dari Wassidik guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c) mengoptimalkan penggunaan *e-MP* (e-manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan penyidikan perkara dan transparansi;

4) arah bijak: mengoptimalkan peran pusat data dan informasi kriminal nasional;

untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melanjutkan integrasi seluruh "*database"* pelayanan dan penyajian informasi kriminal dari seluruh Satker di lingkungan Polri dan institusi penegak hukum lainnya;

b) melanjutkan pelaksanaan standardisasi data kriminal nasional (melalui *Integrated Smart Criminal* Information *System*);

d. Sasaran Prioritas IV "Mewujudkan Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan serta Pembangunan Kapasitas SDM yang Cerdas, Berintegritas dan Profesional" terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:

1) arah bijak: meningkatkan kualitas hasil lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polri yang siap pakai di era *police 5.0*;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 9 (sembilan) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan mutu dari lulusan Diklat Polri agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan tugas Polri ke depan;

b) melaksanakan sertifikasi bagi lulusan Diklat, gadik/instruktur dan pengasuh;

c) meningkatkan pelaksanaan latihan dan Harkatpuan fungsi *"Dalmas dan Negosiator"* yang yang menjunjung tinggi HAM dalam rangka menghadapi pengamanan *event* nasional/ internasional tahun 2025;

d) meningkatkan dan melanjutkan pelatihan dalam penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang *"Menjunjung Tinggi HAM"* dalam rangka menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas dan tahapan pengamanan event nasional/internasional tahun 2025;

e) meningkatkan *kapasitas SDM* bidang Siber Polri, kualitas dan kuantitas SDM bidang digital forensik yang "*Profesional"* dalam rangka menghadapi tahapan pengamanan nasional/internasional tahun 2025;

f) meningkatkan jumlah peserta sertifikasi profesi bagi anggota penyidik Reskrim, Polair Korpolairud Baharkam Polri serta Korlantas Polri dalam rangka mengantisipasi penerapan KUHP baru;

g) melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/ jasa pemerintah bagi anggota Polri dan ASN Polri;

h) melanjutkan dan melaksanakan peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel kedokteran kepolisian;

i) meningkatkan kualitas dan kapabilitas para Verifikator dan APIP dilingkungan Polri dalam upaya tertib administrasi keuangan serta mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;

2) arah bijak: mengoptimalkan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *(SPBE)* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Polri;
b) mewujudkan pelayanan publik Polri yang berkualitas dan terpercaya;

3) arah bijak: meningkatkan kualitas SDM Polri yang unggul dan humanis di era *Police* 5.0;

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 8 (delapan) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melanjutkan pemantapan program rekrutmen proaktif secara selektif guna memperoleh anggota Polri yang berkualitas secara terpadu dan berbasis T.I (*Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward*);
b) melanjutkan persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif melalui program manajemen talenta;
c) melanjutkan penyiapan kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas dari praktik KKN;
d) melaksanakan rekrutmen bagi pegawai negeri pada Polri sesuai kebutuhan organisasi dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta mengalokasikan rekruitmen PNS Polri yang mengakomodir kelompok berkebutuhan khusus serta berbasis teknologi informasi dengan sistem *zero growth* untuk memperoleh calon anggota Polri yang berkualitas, dengan target pemenuhan personel (rekrutmen) tahun 2025 sebanyak Penerimaan Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) direncanakan sebanyak 7.000 orang untuk pendidikan pembentukan Polri meliputi: Akpol, SIPSS, Bintara Polri, Tamtama Polri dan ASN;
e) melaksanakan seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polri untuk meningkatkan kompetensinya tahun 2025 sebanyak 6.395 orang terdiri dari: Lemhanas 60 orang, Sespimti 75 orang, Sespimmen 200 orang, S-2 KIK-UI 20 Orang, S-3 STIK-PTIK 20 orang, S-2

STIK-PTIK 30 orang, S-1 STIK-PTIK 200 orang, S-2 MSDM-UI 20 orang, Sespimma 300 orang, Sekolah Inspektur Polisi (SIP) 2.500 orang, Pendidikan Alih Golongan (PAG) 1.500 orang, Sekolah Bintara Polisi (SBP) 300 orang, Intel LN 60 orang, UDKP/I PNS 400 orang, PKN I 30 orang, PKN II 70 orang, PKA 120 orang, PKP 120 orang, Kermadik Gassus 300 Orang, SPPK 70 Orang;

f) melaksanakan seleksi Dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif;

g) melaksanakan reformasi pengelolaan SDM secara profesional guna menyiapkan pimpinan Polri yang dapat menjadi teladan, melayani dan transformatif;

h) menyiapkan dan mengelola personel Polri sebanyak 1.667 Pers yang akan ditugaskan di IKN secara bertahap;

4) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri;

untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melanjutkan dan melaksanakan rintisan serta perpanjangan *MoU* kermadik Dagri dan Lugri;

b) melanjutkan kerja sama dengan lembaga/asosiasi sertifikasi dalam dan luar negeri;

c) menyelenggarakan kerja sama dengan *stakeholder*, terkait penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta *clear and clean* dengan menggunakan *Computer Asisted Test (CAT)* di tingkat Polda;

5) arah bijak: melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja; untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melanjutkan penyempurnakan standar penilaian kompetensi serta memberikan kredit/poin dalam penilaian kinerja berdasarkan spesifikasi penugasan dan wilayah serta meningkatkan *"sistem reward and punishment"* serta sistem *reward* terhadap kualifikasi personil Polri yang mampu mengaktualisasi diri lebih baik dalam keilmuan dan kehidupan masyarakat;

b) membangun sistem penilaian kompetensi Polri (kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung "*program manajemen talenta*";

c) optimalisasi Sistem Manajemen Kinerja *online* dengan SIPP guna menerapkan *Merit System* dalam manajemen pembinaan karier dalam rangka memberikan kesempatan yang sama dalam berkarya;

d) meningkatkan jumlah assesor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus;

6) arah bijak: meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja;

untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama bagi anggota Polri dan masyarakat;

b) mengoptimalkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polri yang gugur/tewas dalam tugas menumbuhkan budaya melayani yang non diskriminasi dan *user friendly;*

c) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pegawai bagi anggota Polri, menumbuhkan budaya melayani yang nondiskriminasi dan *user friendly* termasuk berkaitan dengan ASABRI;

d) melanjutkan peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS);

e. Sasaran Prioritas V "Mengembangkan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polri yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Berbasis *Minimum Essential Police Equipment (MEPE)*" terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:

1) arah bijak: memenuhi sarana dan prasarana dan Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 13 (tiga belas) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melanjutkan pembangunan ruang RPK, SPKT di Polda, Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara *online;*

b) melanjutkan pemenuhan almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insurjensi dan pemeliharaan keamanan;

c) melanjutkan pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi Fungsi Lalu Lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan gedung BPKB dan STNK *online;*

d) melanjutkan pengembangan Pembangunan Indonesia *Safety Driving Center;*

e) melanjutkan dan meningkatkan pembangunan RTMC/TMC;

f) melanjutkan pembangunan/pemasangan *ETLE* guna menegakkan hukum secara transparan di jalan raya;

g) pembangunan dan meningkatkan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada anggota dan PNS Polri serta masyarakat umum;

h) melanjutkan Litbang guna pembuatan *prototype* peralatan Polri berbasis teknologi dan inovasi teknologi kepolisian terkini;

i) membangun dan mengembangkan sistem komunikasi di wilayah perbatasan, Pulau Terluar dan wilayah rawan bencana;

j) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri terkini (Min dan Maks);

k) pemenuhan peralatan penanganan awal Bencana, Karhutla dan Banjir sesuai dengan karakteristik wilayah dalam rangka pertolongan pertama kepada masyarakat;

l) pemenuhan Almatsus Polri berbasis kendaraan listrik guna mendukung program pemerintah di bidang energi terbaharukan;

m) pemenuhan almatsus/alpalkam untuk digunakan dalam pengamanan nasional/internasional 2025, Perbatasan dan Destinasi Wisata;

2) arah bijak: mendorong peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (Bumnis) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Polri;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melanjutkan kerja sama dengan BUMNIS dan Industri Swasta Nasional (ISN) dalam pembuatan *prototype,* berikut melakukan Standardisasi dan Sertifikasi Alpalkam dan Almatsus Polri;

b) mendorong penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pelaksanaan Pengadaan Almatsus dan Alsus Polri;

3) arah bijak: pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan mendorong pembangunan rumah dinas termasuk di wilayah perbatasan;

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melanjutkan usulan pembangunan fasilitas kantor Polri di IKN dan rencana pembangunan Mako Polda dan Polres/Polrestabes;
b) melanjutkan pembangunan fasilitas pergudangan, rumah dinas, flat dan rusun bagi personel Polri;
c) melanjutkan pembangunan rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya (poliklinik) yang dekat dengan personel dan masyarakat guna mendukung *"Reformasi Sistem Kesehatan Nasional"*;
d) melanjutkan pembangunan fasilitas perkantoran dan Rumdin guna *mempercepat* pembangunan di wilayah perbatasan secara selektif prioritas dan berkelanjutan.

4) arah bijak: melanjutkan pengembangan laboratorium forensik di kewilayahan secara bertahap;

untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat strategi yang akan dilakukan yaitu:

melanjutkan pembangunan pengembangan laboratorium forensik beserta rumah dinasnya di tingkat kewilayahan dalam rangka mendukung percepatan pengungkapan kasus tindak pidana;

5) arah bijak: melanjutkan pengembangan Almatsus SCI;

untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat strategi yang akan dilakukan yaitu:

melanjutkan pemenuhan peralatan laboratorium forensik dan sidik jari dengan teknologi terkini;

6) arah bijak: membangun dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;

untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melanjutkan pengadaan sistem informasi kepolisian secara bertahap yang terintegrasi;
b) melanjutkan penataan infrastruktur layanan darurat/*hotline* kepolisian secara bertahap dengan nomor tunggal dalam rangka merespons dengan cepat pengaduan masyarakat;
c) mengembangkan teknologi kepolisian dan sistem informasi berdasarkan hasil penelitian;

f. Sasaran Prioritas VI *"*Meningkatkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian*"* terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:

1) arah bijak: melanjutkan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online;*

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) mengoptimalkan klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu yang berbasis TI;
b) mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online;*
c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas *eksternal* dengan berbasis TI*;*

2) arah bijak: melanjutkan dan mengoptimalkan kegiatan Saber Pungli di lingkungan internal Polri;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 6 (enam) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melanjutkan dan meningkatkan sinergisitas dari Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas pungli serta pelaporan yang terintegrasi;
b) mendorong pelayanan publik secara *online* yang bersih transparan dan akuntabel berbasis *Medsos/Whatsapp*;
c) mengoptimalkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah Pungli;
d) melanjutkan pelaksanaan pengamanan (kegiatan, personel, Baket) terkait rekrutmen pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS;
e) melanjutkan pelaksanaan pengamanan kegiatan personel, Baket terkait Pendidikan Pengembangan: SIP, Sespima, Sespimmen/ PKN Tingkat 2, Sespimti/Lemhanas dan PKN Tingkat 1;
f) melanjutkan pelaksanaan kegiatan *"operasi bersih"* diinternal dan di sentra pelayanan publik Polri baik terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik (SIM, STNK, BPKB, SKCK);

3) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri;

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan peran serta seluruh anggota sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait dugaan korupsi di tubuh Polri melalui Aplikasi *Whistle Blower System (WBS).* Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan korupsi;

b) melanjutkan sosialisasi “Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017” tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4) arah bijak: meningkatkan tata kelola manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel;

untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran Satker agar lebih efektif dan efisien;
b) melanjutkan, meningkatkan dan mengembangkan sinergisitas dalam *e-Jakstra* guna menyusun produk perencanaan dan penganggaran Polri (Domren Kapolri, Rancangan Renja Polri dan Renja Polri) guna menyelaraskan pembangunan di lingkungan Polri agar semakin berkualitas;
c) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung jawab tata kelola keuangan tingkat Satker;
d) melaksanakan dan meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan;
e) melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dan anggaran di bidang pembinaan dan operasional;

5) arah bijak: melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien;

untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melanjutkan dan melaksanakan Monev pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap serta mengubah kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan);
b) melanjutkan penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi Kamtibmas dan perkembangannya termasuk mendukung pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat;
c) melanjutkan dan penyempurnaan peraturan tentang SOTK tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor serta menyusun kesiapan terbentuknya Satwil baru guna mendukung IKN;

6) arah bijak: meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri guna meraih berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;

untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polri untuk memedomani kebijakan Forum Konsultansi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/*stakeholder* terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat;
b) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/Polresta/ Polrestabes dan

Polres Metro, sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri;

c) melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polri yang berpartisipasi, sehingga lebih besar peluang untuk memperoleh kategori TOP 99/45 inovasi pelayanan publik;

d) melanjutkan, mempertahankan dan meningkatkan capaian Satker/Satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;

e) melanjutkan pelaksanaan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata Kelola (ITK) Polri berbasis *web* dan *mobile* secara *online* (ITK-O) tingkat Polres Metro/Polrestabes/Polresta/Polres dan Satker Polda;

2. Arah Kebijakan dan Strategi Pusdokkes Polri

a. Sasaran Strategis “Terwujudnya pelayanan kedokteran dan kesehatan kepolisian yang modern dan Paripurna, berstandar internasional untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kedokteran kepolisian yang mendukung tugas pokok dan fungsi Polri.
untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas identifikasi korban berdasarkan metode yang modern dan berstandar internasional.

b) Mempercepat proses identifikasi korban guna mendukung tugas dan fungsi Polri.

2) Pemantapan layanan Kesehatan Polri yang mendukung tugas pokok dan fungsi Polri.

untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) Meningkatkan kinerja pelayanan Kesehatan di pusat dan di wilayah secara paripurna.

b) Memantapkan Sembilan area yang menjadi indikator kepuasan layanan Kesehatan.

b. Sasaran Strategis “Terselenggaranya pelayanan kedokteran kepolisian yang berstandar internasional” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Pemantapan proses identifikasi korban bencana menggunakan prosedur berstandar internasional.

untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) Menstandarkan proses identifikasi korban sesuai dengan prosedur ICPO/Interpol.

b) Mengintegrasikan database antemortem dalam mendukung proses indentifikasi korban.

c) Meningkatkan sinergitas DVI di dalam dan luar negeri.

2) Peningkatan layanan kedokteran kepolisian berstandar internasional

untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) Meningkatkan layanan kedokteran forensik (forensik patologi, forensik klinik, forensik antropologi, dan forensik psikiatri) secara modern dan berstandar internasional.
b) Meningkatkan layanan Keskamtibmas di pusat dan di wilayah secara modern dan berstandar internasional.
c) Meningkatkan layanan odontology kepolisian di pusat dan di wilayah secara modern dan berstandar internasional.
d) Mengintegrasikan data base odontogram sampai ke wilayah.

c. Sasaran Strategis “Terselenggaranya pelayanan Kesehatan yang paripurna, bermutu dan merata sampai ke wilayah” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Pemantapan layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Bhayangkara.
untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:
a) Meningkatkan pembangunan dan pembentukan Rumah Sakit Bhayangkara.
b) Melakukan pemenuhan persyaratan untuk akreditasi Rumah Sakit Bhayangkara.
c) Mengembangkan layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Bhayangkara.
d) Meningkatkan kelas/status Rumah Sakit Bhayangkara.
e) Melaksanakan pembinaan teknis PK-BLU Rumah Sakit Bhayangkara.

2) Pemantapan layanan Kesehatan pada FKTP.

untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) Meningkatkan pembangunan dan pembentukan FKTP.
b) Melakukan pemenuhan persyaratan untuk akreditasi FKTP.
c) Mengembangkan layanan Kesehatan pada FKTP.
d) Meningkatkan kelas/status FKTP.

3) Pemantapan layanan rikkes berkala personel Polri.
untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) Meningkatkan layanan rikkes berkala.
b) Meningkatkan target dan cakupan personil Polri yang melakukan rikkes berkala.
c) Memantau hasil rikkes berkala personil Polri.

d. Sasaran Strategis "Terselenggaranya layanan laboratorium kedokteran Kesehatan kepolisian berdasarkan standar ilmu pengetahuan dan teknologi" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Peningkatan layanan laboratorium kedokteran kepolisian menggunakan metode terkini yang diakui di tingkat internasional.
untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) Meningkatkan layanan Laboratorium DNA secara modern dan berstandar internasional.

b) Meningkatkan layanan Laboratorium Biomedik secara modern dan berstandar internasional.
c) Menjamin mutu layanan laboratorium sesuai standar mutu yang berlaku.

e. Sasaran Strategis “Terwujudnya pengelolaan SDM Dokkes Polri yang mandiri, profesional dan kompeten” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
1) Peningkatan kemampuan SDM Pusdokkes polri.
untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:
a) Menyelenggarakan peningkatan kemampuan SDM Dokkes Polri sesuai kebutuhan
2) Pemenuhan jumlah personel Dokkes Polri sesuai dengan kualifikasinya.
untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:
a) Memetakan rencana kebutuhan SDM Dokkes Polri.
b) Melakukan upaya pemenuhan SDM Dokkes Polri sesuai kualifikasinya.
3) Peningkatan kualitas SDM Dokkes Polri sesuai dengan kebutuhan.
untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:
a) Melakukan kegiatan Pendidikan D3/S1/S2/S3.
b) Melakukan kegiatan Pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis/sub spesialis.

c) Melaksanakan Dikjur Dokpol.
d) Melakukan kerja sama Pendidikan pengembangan umum dan spesialis sesuai kebutuhan.

f. Sasaran Strategis “Terwujudnya almatsus, perbekalan dan fasilitas Dokkes Polri yang modern dan memadai sesuai kebutuhan” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
1) Pemenuhan almatsus, perbekalan dan fasilitas Dokkes Polri yang modern dan memadai sesuai kebutuhan.
untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:
a) Menginventarisir dan merencanakan kebutuhan almatsus, perbekalan dan fasilitas Dokkes Polri.
b) Membangun dan mengembangkan fasilitas kesehatan Polri seperti Poliklinik, Rumkit Bhayangkara dan faskes lainnya.
c) Melakukan pemenuhan dan modernisasi sarpras (Matfaskes, Almatsus dan aplikasi) secara bertahap.

g. Sasaran Strategis “Terwujudnya perencanaan Dokkes Polri yang efektif, efisien dan akuntabel” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
1) Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Dokkes Polri untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:
a) Menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Pusdokkes Polri.
b) Menyusun LKIP .

2) Penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran
untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:
   a) Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran
   b) Meningkatkan nilai IKPA

h. Sasaran Strategis “Terwujudnya organisasi Dokkes Polri yang rasional, agile dan modern” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
   1) Penguatan organisasi Dokkes Polri
   untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:
      a) Menerapkan organsiasi Pusdokkes Polri yang agile dan modern.
      b) Mewujudkan organisasi Dokkes Polri yang tepat struktur dan tepat fungsi.

   2) Pemetaan dan penataan regulasi terkait pelayanan Kesehatan Polri
   untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:
      a) Melakukan pemetaan kebutuhan regulasi terkait pelayanan Kesehatan Polri.
      b) Melakukan penyusunan regulasi terkait pelayanan Kesehatan Polri sesuai kebutuhan dan perkembangan terkini.

   3) Pemetaan dan penataan regulasi terkait pelayanan Kedokteran Kepolisian yang modern
   untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:
      a) Melakukan pemetaan kebutuhan regulasi terkait pelayanan kedokteran kepolisian.
      b) Melakukan penyusunan regulasi terkait pelayanan kedokteran kepolisian sesuai kebutuhan dan perkembangan terkini.

   4) Sistem dan metode Dokkes Polri yang *up to date*

untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) Melakukan penyusunan proses bisnis sesuai dengan perubahan organisasi dan peraturan terkini.
b) Melakukan penyusunan SOP sesuai dengan perubahan organisasi, peraturan terkini, dan proses bisnis terkini.

3. **Arah Kebijakan dan Strategi Polda**

Arah kebijakan dan strategi Polda Jambi akan diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi Nasional yang telah ditetapkan pada RPJPN. Untuk memperkuat analisis, arah kebijakan dan strategi Polda Jambi diformulasikan dengan mempertimbangkan kondisi Polda Jambi saat ini dan kondisi yang ingin dicapai oleh Polda Jambi pada tahun 2029. Arah kebijakan Polda Jambi periode 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. sasaran Strategis "Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
   1) peningkatan fungsi intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan ancaman dan gangguan serta memperkuat sistem keamanan Provinsi Jambi secara responsif dan prediktif;

      untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jambi merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

      a) penguatan fungsi intelijen di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan dalam wilayah Provinsi Jambi serta meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui data sharing (termasuk pemberitahuan potensi ancaman kepada fungsi terkait); *(G.S)*
      b) meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan di dalam dan luar wilayah Provinsi Jambi dengan mengoptimalkan pengumpulan data intelijen/informasi dengan mengembangkan penyimpanan data digital

terpadu/terpusat yang mengintegrasikan berbagai sumber input; *(G.S)*

c) mengoptimalkan operasi Intelijen (penyelidikan, pengamanan dan penggalangan) terhadap potensi gangguan kamtibmas secara konvensional dan siber; (Asta Cita)

d) meningkatkan keamanan siber di lingkungan kepolisian;

e) mengoptimalkan kegiatan kontra intelijen pencegahan terorisme, tindak pidana pencucian uang, serangan siber, perjudian online dan transaksi cryptocurrency; (Asta Cita)
f) meningkatkan peran deteksi dini serta pencegahan tindak pidana penyelundupan orang dan barang ilegal; (Asta Cita)

2) peningkatan upaya keamanan dalam pencegahan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya secara responsif dan prediktif;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jambi merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) meningkatkan kesadaran Kamtibmas di masyarakat melalui keterlibatan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas;
b) menumbuhkembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*); (G.S, *Quickwins*);
c) mengoptimalkan pembinaan dan penyuluhan terhadap penanggulangan bahaya judi dan judi online, kejahatan transnasional, dan penyelundupan barang ilegal; (Asta Cita);
d) memperkuat sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya yang rentan;
e) mengoptimalkan pencegahan aksi terorisme, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya dengan cara memperkuat sinergisitas dengan institusi penegak hukum lainnya (zero terorist attack); (Asta Cita);
f) memperkuat sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya yang rentan;
g) mengoptimalkan pencegahan aksi terorisme, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya dengan cara memperkuat sinergitas dengan institusi penegak hukum lainnya;

h) peningkatan…

h) peningkatan pemeliharaan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah Provinsi Jambi secara responsif dan prediktif;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jambi merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) mengoptimalkan pengamanan perairan dan udara guna mendeteksi ancaman keamanan dan keselamatan di laut Indonesia; *(*Asta Cita);
b) meningkatkan kolaborasi dan peran aktif masyarakat pesisir dalam mendukung pengamanan laut;

3) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jambi merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya; (G.S)
b) meningkatkan reliabilitas dan transparansi layanan administrasi lalu lintas dengan memperluas model layanan berbasis digital; (G.S, Quickwins)
c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda Jambi;
d) meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas serta untuk menyempurnakan regulasi dan kebijakan lalu lintas; (G.S)
e) meningkatkan Turjawali di tengah masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di jalan raya;

4) peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polda Jambi dalam Harkamtibmas yang responsif dan prediktif;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jambi merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) meningkatkan….

a) meningkatkan kerja sama dan sinergisitas dengan institusi pemerintah dan swasta untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
b) meningkatkan peran dan kerja sama dalam penanganan kejahatan lintas provinsi dan nasional;
c) meningkatkan sumber informasi dan *networking* yang memadai;
d) meningkatkan sinergisitas dengan masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
e) memperkuat sinergitas antar institusi apparat penegakan hukum
f) dalam pencegahan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya;

5) penguatan kegiatan operasional Polda Jambi berbasis teknologi dan *data analytics*;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jambi merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) yang berbasis *data analytics* guna meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polda Jambi dengan menerapkan mekanisme berbasis tingkat ancaman/kebutuhan penanganan kejadian; *(G.S)*
b) mengelola data *analytics* dari media konvensional dan digital secara efektif dalam penguatan kegiatan operasional kepolisian dan membangun kepercayaan publik;
c) meningkatkan penanggulangan berita negatif (*hoaks*) yang dapat mengganggu Kamtibmas berdasarkan *media analytics*;
d) melakukan pemutakhiran data kepolisian yang ter "*update*" secara akurat dan tepat waktu;
e) menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat (misalnya, *hotline*, *police superapp*, *Whats App for business*); (G.S)
f) meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi berbasis tingkat ancaman/gangguan; (G.S)

6) meningkatkan….

6) meningkatkan kehadiran Polda Jambi ditengah masyarakat secara optimal dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jambi merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) mendukung pengamanan pelaksanaan program pemerintah (Posyandu, penurunan *stunting* serta swasembada pangan);
b) meningkatkan kehadiran Polda Jambi di tengah masyarakat dalam menjaga Harkamtibmas;
c) meningkatkan keamanan dan ketertiban kawasan pariwisata; (Asta Cita)
d) menjaga keamanan jalur logistik dan transportasi; (Asta Cita)
e) menciptakan ruang publik dan fasilitas umum yang aman bagi penyandang disabilitas dan kelompok difabel; (Asta Cita)
f) mendukung dan meningkatkan dukungan keamanan di kompetesi olahraga, kesenian dan budaya secara profesional dan berstandar nasional; (Asta Cita).
g) mendukung dan memastikan tercapainya penyaluran subsidi kepada masyarakat secara tepat guna bagi masyarakat yang membutuhkan; (Asta Cita)
h) menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika dan hak yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat; (Asta Cita)
i) mendukung penanggulangan dan penanganan bencana secara profesional; (Asta Cita)

7) meningkatkan kegiatan sadar Kamtibmas bagi masyarakat;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jambi merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, penyelundupan manusia dan barang ilegal;

c) memperkuat…

c) memperkuat keterlibatan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas dan mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;

8) peningkatan kegiatan *pre-emptif* dan *preventif* dalam perlindungan perempuan dan anak;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jambi merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) meningkatkan sosialisasi terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak; (Asta Cita)

b) menyelenggarakan layanan pengaduan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.

b. Sasaran Strategis "Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan secara transparan, akuntabel, dan berbasis ilmiah (*Scientific Criminal Investigation*);

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jambi merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum dalam rangka ungkap kasus;

b) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber Polda Jambi guna mendukung penguatan pengamanan infrastruktur siber; (Asta cita)

c) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, siber, *Illegal Mining*, *Illegal Fishing*, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta penyelundupan manusia dan barang; (Asta Cita)

d) mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di dalam negeri; (Asta Cita)

f) mengoptimalkan…

e) mengoptimalkan dukungan penanggulangan terorisme dalam rangka meminimalisir risiko (penyelamatan sandera, penjinakan bom dll);
f) meningkatkan pemberantasan kasus-kasus perjudian serta menutup akses ke situs judi (termasuk judi online); (Asta Cita)
g) menangani kekhawatiran penduduk berjalan keluar di malam hari;
h) memperkuat penerapan *Scientific Crime Investigation* (SCI) dalam pengolahan tempat kejadian perkara;
i) mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba dan penyelundupan orang maupun barang; (Asta Cita)
j) meningkatkan keberhasilan dalam pengungkapan kejahatan diwilayah Provinsi Jambi; (Asta Cita);
k) memperkuat penegakan hukum yang adil, transparan, legal, humanis dan setara serta menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan sistem pelaporan terpadu di seluruh Polda Jambi agar SOP dan Sistem Manajemen kasus terintegrasi; (G.S, Quickwins);
l) mengoptimalkan penanganan kejahatan di wilayah provinsi Jambi;
m) memperkuat penerapan “keadilan restoratife serta peran mediasi”
n) dalam penyelesaian konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas;

b) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional yang terintegrasi;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka polda Jambi merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker Polda Jambi dan aparat penegak hukum serta memperkuat adaptivitas penanganan kejahatan di wilayah Provinsi Jambi; (G.S)
b) mengembangkan standardisasi data kriminal di wilayah Provinsi Jambi;

c) mengembangkan sistem informasi kriminal di wilayah Provinsi Jambi yang terintegrasi;
d) memperkuat digitalisasi di lingkungan penegakan hukum guna menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan platform pelaporan terpadu di lingkungan Polda Jambi; (G.S)

c) percepatan penanganan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak secara humanis dan berkeadilan;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jambi merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) melaksanakan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan "*keadilan restoratif*" terhadap perempuan dan anak serta kaum disabilitas yang menjadi pelaku; (Asta Cita)
b) mengoptimalkan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak; (KemenPPA)

d) memberikan pelayanan penegakan hukum yang adil, transparan, humanis, dan akuntabel;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jambi merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) menyediakan fasilitas rehabilitasi medis tindak pidana Narkoba;
b) menyediakan fasilitas rehabilitasi medis tindak pidana Narkoba;
c) membangun sistem penegakan hukum yang terbuka dan akuntabel;
d) mengoptimalkan SP2HP dalam penangan perkara.

e) peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polda Jambi dalam penegakan hukum yang transparan, akuntabel, humanis, dan adil;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jambi merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antar organisasi dalam pemeliharaan dan peningkatan keamanan, serta penegakan hukum di wilayah Provinsi Jambi; *(*Asta Cita*)*

b) meningkatkan kerja sama nasional di bidang penyelidikan dan penyidikan;
c) memperkuat sinergisitas antar institusi aparat penegakan hukum dalam penanggulangan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya.
d) meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antar organisasi dalam pemeliharaan dan peningkatan keamanan, serta penegakan hukum di wilayah Provinsi Jambi; *(*Asta Cita*)*
e) meningkatkan kerja sama nasional di bidang penyelidikan dan penyidikan;
f) memperkuat sinergisitas antar institusi aparat penegakan hukum dalam penanggulangan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya.

c. Sasaran Strategis “Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polda Jambi yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
1) peningkatan kapabilitas dan kapasitas SDM Polda Jambi yang jujur, bermartabat, dan berintegritas secara terpadu dan menyeluruh;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jambi merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
a) menyiapkan program diklat yang sesuai dengan tantangan tugas dan kebutuhan terkini;
b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polda Jambi yang berorientasi pada pelayanan publik serta memperhatikan kepuasan masyarakat;
c) meningkatkan relevansi kurikulum dan bahan ajar diklat dengan tantangan tugas;
d) meningkatkan jumlah SDM Polda Jambi yang memiliki sertifikasi kompetensi; (Asta Cita)
e) mengembangkan program kerja sama Diklat dalam dan luar instansi;

f) meningkatkan jumlah pendidik yang telah memiliki sertifikasi kompetensi;
g) memperkuat kapasitas, kapabilitas dan integritas SDM Polda Jambi yang berorientasi pelayanan masyarakat yang optimal;
h) menanamkan dan mengimplementasikan nilai -nilai bhayangkara dalam diri personel Polda Jambi;
i) meningkatkan kapastitas dan kapabilitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan operasional Polda Jambi berbasis teknologi dan data *analytics*;
j) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak; (Asta Cita).

2) pengelolaan SDM secara profesional, akuntabel dan terintegrasi; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jambi merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
a) meningkatkan pemenuhan jabatan berdasarkan standar jabatan dan kompetensi serta menarik minat dan mempertahankan talenta terbaik dengan mengartikulasikan kembali *Employee Value Proposition (EVP)* Polri; (G.S)
b) memperkuat implementasi *merit system*, menyempurnakan sistem pengembangan karier dengan menerapkan *personalized learning* serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personel dan organisasi; (G.S)
c) menerapkan system reward and punishment berbasis kinerja;
d) meningkatkan proporsi Polwan; (RPJMN)
e) meningkatkan kesejahteraan SDM Polda Jambi (Asta Cita);
f) meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi SDM Polda Jambi secara adil dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku;
g) melaksanakan kebijakan zero growth dalam rekrutmen kepolisian dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dan sesuai dengan Analisis kebutuhan dengan merevitalisasi strategi rekrutmen proaktif (termasuk

mengintegrasikan badan pengembangan eksternal dan internal sebagai sumber calon personel); (G.S)

h) memperkuat implementasi pemenuhan personel berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK);
i) melakukan kajian dan pemenuhan kebutuhan personel untuk pembentukan Polda baru dalam rangka pemekaran provinsi;
j) meningkatkan kesehatan SDM Polri secara fisik, psikis, dan mental;

d. Sasaran Strategis "Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) modernisasi sarana dan prasarana Polda Jambi;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jambi merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) memetakan dan menyempurnakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polda Jambi tahun 2025-2029 dalam pemenuhan Almatsus Polda Jambi untuk mendukung manajemen logistik dan fasilitas berbasis *MEPE* untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; *(G.S)*
b) meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI Polda Jambi *(I.T Enterprise Architecture*); *(G.S)*
c) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional pelayanan kepolisian sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) di tingkat Polda sampai ke wilayah Polsubsektor; (Asta Cita)
d) melakukan modernisasi sarana dan prasarana operasional keamanan perairan (kapal patroli laut);
e) menyiapkan pembangunan ruang dan fasilitas kerja bagi SDM Polda Jambi berkebutuhan khusus;
f) mengembangkan tata kelola dan sistem kearsipan dan naskah dinas yang modern;
g) memperkuat sistem data dan informasi hukum Polda Jambi;

j) meningkatkan…

h) meningkatkan sarana dan prasarana keamanan siber di lingkungan Polda Jambi;
i) mengintegrasikan sistem informasi dan komunikasi kepolisian dari Tingkat Polsek sampai Tingkat Polda dalam rangka mengintegrasikan sistem informasi dan komunikasi kepolisian dari
Tingkat Polsek sampai Tingkat Polda dalam rangka Harkamtibmas dan Gakkum;
j) meningkatkan penggunaan produk local dalam pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur Kepolisian; (Asta Cita)

2) pengelolaan aset kepolisian yang akuntabel, terbuka, modern dan terintegrasi;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jambi merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) menyempurnakan sistem manajemen logistik dan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; (G.S)
b) menerapkan sistem pengelolaan dan membangun rumah dinas/flat/barak dan rusun bagi personel Polda Jambi;
c) meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Polda Jambi;
d) menyediakan dan meningkatkan kualitas dan fasilitas kesehatan rumah (sakit/FKTP) dan layanan Kesehatan yang memadai bagi
Kesehatan yang memadai bagi anggota Polda Jambi hingga tingkat Polsek;
e) meningkatkan kualitas dan fasilitas kesehatan Polda Jambi (Rumah Sakit Bhayangkara) di Polda Jambi yang paripurna dalam mendukung tugas dan fungsi Polri serta program;
f) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak.

e. Sasaran Strategis "Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel" dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) peningkatan pelayanan publik yang prima dan kedekatan dengan masyarakat;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jambi merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) meningkatkan kualitas sesuai standard pelayanan publik Polda Jambi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis Polri dengan menstandardisasi, menyempurnakan dan memastikan pelaksanaan SOP; *(G.S)*
b) menyederhanakan proses pelayanan publik bagi masyarakat; (Asta Cita)
c) meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan data dan informasi kriminal nasional;
d) meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan Polda Jambi;
e) memperkuat keterlibatan Polda Jambi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan pendekatan secara personal serta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui redesain interaksi kepolisian dan masyarakat; (G.S)
f) meningkatkan pengelolaan citra Polri khususnya Polda Jambi di masyarakat;
g) memperkuat kerja sama antara masyarakat, TNI dan DPR yang dapat mendukung kinerja Polda Jambi;
h) menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dilakukan dengan kendali mutu dan biaya, disertai sarana dan prasarasana Fasilitas Kesehatan yang memadai (BPJS Kesehatan);
i) meningkatkan efektivitas sistem pengaduan masyarakat; (Quickwins).

2) penguatan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Polda Jambi;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jambi merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

i) meningkatkan…

a) membangun sistem penerapan budaya integritas, nilai-nilai kejujuran dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian dengan memedomani kode etik Polda Jambi;
b) mendorong perubahan budaya dengan merumuskan dan menginternalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi masyarakat; (G.S)
c) meningkatkan manajemen kinerja Polda Jambi dan Tingkat Polda sampai dengan Polsubsektor dengan standard pelayanan di UPP Polri;

d) melakukan…

d) melakukan pengkajian dan penataan tusi (tugas dan fungsi) Polda Jambi di tingkat Polda sampai Kewilayahan guna mengonsolidasikan fungsi-fungsi tertentu di organisasi Polri dengan menciptakan model *shared services*; (G.S)

e) memperkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi Polda Jambi di tingkat Polda sampai Kewilayahan mewujudkan kapabilitas dan ukuran organisasi yang optimal (rasionalisasi organisasi) dengan menerapkan *Strategic Workforce Planning*; (G.S)

f) meningkatkan akuntabilitas dan *agility* dari organisasi dengan menyempurnakan model tata kelola dan model operasional; (G.S)

g) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal guna meningkatkan adaptabilitas dan kelincahan organisasi dengan menyempurnakan sistem tata kelola; (G.S)

h) memperkuat implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah guna menciptakan budaya berbasis kepatuhan dan risiko dengan memperkuat kerangka kerja pengawasan, kepatuhan dan manajemen risiko Polri;(G.S)

3) penguatan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jambi merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polda Jambi;

b) melakukan penyelarasan kinerja Polda Jambi sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana serta merancang ulang sistem manajemen kinerja dan metode penilaian kinerja; (G.S)

c) membangun alokasi anggaran pada klasifikasi jenis belanja secara proporsional;

d) memperkuat akuntabilitas kinerja dan anggaran Polda Jambi;

e) memperkuat sistem dan kualitas pelaporan keuangan Polda Jambi yang akuntabel, terintegrasi dan bersifat real time;

4) penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang efektif;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Jambi merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) meningkatkan kualitas penanganan komplain/pengaduan masyarakat secara efektif dan terpercaya;
b) meningkatkan mekanisme pengelolaan bantuan hukum untuk kejahatan di wilayah Provinsi Jambi;
c) meningkatkan efektivitas harmonisasi dan penyelarasan regulasi pemerintah ke tingkat Polda Jambi;
d) mempercepat proses pemenuhan regulasi di lingkungan Polda Jambi;
e) meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan regulasi di lingkungan Polda Jambi.

4. Arah Kebijakan dan Strategis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi

a. Sasaran Strategis “Terwujudnya pelayanan kedokteran dan kesehatan kepolisian yang modern dan Paripurna, berstandar internasional untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kedokteran kepolisian yang mendukung tugas pokok dan fungsi Polri.
untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:
a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas identifikasi korban berdasarkan metode yang modern dan berstandar internasional.

b) Mempercepat proses identifikasi korban guna mendukung tugas dan fungsi Polri.

2) Pemantapan layanan Kesehatan Polri yang mendukung tugas pokok dan fungsi Polri.

untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) Meningkatkan kinerja pelayanan Kesehatan di pusat dan di wilayah secara paripurna.

b) Memantapkan Sembilan area yang menjadi indikator kepuasan layanan Kesehatan.

b. Peningkatan layanan kedokteran kepolisian berstandar internasional

untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:

1) Meningkatkan layanan kedokteran forensik (forensik patologi, forensik klinik, forensik antropologi, dan forensik psikiatri) secara modern dan berstandar internasional.
2) Meningkatkan layanan Keskamtibmas di pusat dan di wilayah secara modern dan berstandar internasional.
3) Meningkatkan layanan odontology kepolisian di pusat dan di wilayah secara modern dan berstandar internasional.
4) Mengintegrasikan data base odontogram sampai ke wilayah.

c. Sasaran Strategis “Terselenggaranya pelayanan Kesehatan yang paripurna, bermutu dan merata sampai ke wilayah” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

3) Pemantapan layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Bhayangkara.
untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:
a) Meningkatkan pembangunan dan pembentukan Rumah Sakit Bhayangkara.
b) Melakukan pemenuhan persyaratan untuk akreditasi Rumah Sakit Bhayangkara.
c) Mengembangkan layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Bhayangkara.
d) Meningkatkan kelas/status Rumah Sakit Bhayangkara.
e) Melaksanakan pembinaan teknis PK-BLU Rumah Sakit Bhayangkara.

d. Sasaran Strategis “Terwujudnya pengelolaan SDM Rumkit Bhayangkara yang mandiri, profesional dan kompeten” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

4) Peningkatan kemampuan SDM Rumkit Bhayangkara.
untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu: Menyelenggarakan peningkatan kemampuan SDM Rumkit Bhayangkara sesuai kebutuhan

5) Pemenuhan jumlah personel rumkit Bhayangkara sesuai dengan kualifikasinya.
untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:
a) Memetakan rencana kebutuhan SDM Rumkit Bhayangkara.
b) Melakukan upaya pemenuhan SDM Rumkit Bhayangkara sesuai kualifikasinya.

6) Peningkatan kualitas SDM Rumkit Bhayangkara sesuai dengan kebutuhan.
untuk mewujudkan arah bijak tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:
a) Melakukan kegiatan Pendidikan D3/S1/S2/S3.
b) Melaksanakan Dikjur Dokpol.
c) Melakukan kerja sama Pendidikan pengembangan umum dan spesialis sesuai kebutuhan.

a. Arah kebijakan Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dalam rangka pencapaian strategis menjadikan relationship / mitra bagi pelayanan BPJS Kesehatan dan steakholder, yaitu :
   1) memenuhi kelengkapan yang menjadi persyaratan administrasi dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan;
   2) memenuhi sarana prasarana baik yang bersifat khusus maupun umum dalam rangka pemenuhan cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan;
   3) mempersipkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam bidang pelayanan kesehatan serta bidang lainnya;
   4) menjalin kerja sama dengan memperkuat sistem rujukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Arah kebijakan Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dalam rangka meningkatkan daya saing dan jumlah kunjungan pasien, melalui renovasi / perbaikan bangunan Rumkit secara bertahap sesuai prioritas, memperindah, mempersehat lingkungan Rumkit (*heling environment*), melengkapi alkes dan membentuk tim promosi yang produktif serta membangun pelayanan unggulan, yaitu :
   1) melengkapi sarana prasarana baik yang bersifat pokok maupun pendukung dalam rangka pemenuhan layanan kesehatan;
   2) melakukan renovasi maupun penambahan terhadap pemenuhan ruang pelayanan kesehatan;
   3) melakukan renovasi tampilan gedung sehingga tampak lebih representatif;
   4) meningkatkan kemampuan SDM bidang kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan;
   5) melakukan pengelolaan limbah rumah sakit sesuai dengan standar yang telah ditapkan;
   6) melakukan berbagai bentuk promosi dibidang kesehatan maupun dalam rangka pengembangan cakupan pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;

7) berkoordinasi dengan berbagai disiplin ilmu kedokteran dalam rangka pemenuhan pelayanan unggulan yang tidak ada di rumah sakit lainnya;

c. Arah kebijakan Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dalam rangka pencapaian strategis menambah cakupan layanan kesehatan yang lebih luas melalui peningkatan sarana prasarana (gedung, alkes maupun sarana umum lainnya), yaitu :

1) menambah layanan spesialistik dalam rangka menambah cakupan layanan yang lebih luas;
2) menambah ruang pelayanan / unit layanan kesehatan sesuai dengan spesilistik;
3) menambah sarana pendukung layanan kesehatan disetiap unit layanan, diantaranya unit radiologi, laboratorium, poli rawat jalan, rawat inap dan unit lainnya;
4) menambah sarana alat kesehatan yang modern sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi bidang kedokteran;
5) berkoordinasi dengan biro Rena dan biro Sarpras Polda Jambi dalam pengajuan gedung baru untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan;

d. Arah kebijakan Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dalam rangka pencapaian strategi terbangunnya budaya melayani yang berorientasi pada kepuasan dan kenyamanan pelanggan / budaya pelayanan prima, sehingga tingkat kepercayaan terhadap Rumah Sakit Bhayangkara Jambi menjadi lebih baik, yaitu :

1) melakukan pelatihan – pelatihan di bidang custumer service dalam rangka meningkatkan performance personel dalam memberikan pelayanan yang bermutu;
2) meningkatkan mutu SDM dengan melakukan proses rekruitmen sesuai kompetensi yang diperlukan berdasarkan kebutuhan;
3) melengkapi sarana penunjang baik bidang kesehatan maupun bidang umum lainnya;
4) memberikan reward and punismend kepada setiap personel;

e. Arah kebijakan Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dalam rangka pencapaian strategi tersosialisasinya standar-standar pelayanan operasional (SPO) pada

bidang pelayanan medis, penunjang medis, administrasi, rekam medis maupun fasilitas lainnya yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, yaitu

1) membuat standar operasional prosedur disetiap unit / bidang layanan melalui rapat antar ruangan;
2) melakukan sosialisasi disetiap kesempatan terhadap standar yang telah dibuat baik terhadap unit yang bersangkutan maupun terhadap unit lain yang terkait;
3) melakukan perubahan – perubahan dengan cara merevisi standar prosedur yang telah dibuat sesuai dengan kondisi yang ada;

f. Arah kebijakan Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dalam rangka pencapaian strategi penyelenggaraan upaya kesehatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif guna memelihara dan meningkatkan serta mewujudkan kondisi fisik dan psikis yang sehat samapta bagi personil Polda Jambi, melalui :

1) memberikan layanan kesehatan yang paripurna bagi setiap pegawai negeri pada Polri;
2) memberikan layanan kesehatan rujukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan maupun secara kedinasan kepada setiap pegawai negeri pada Polri;
3) meningkatkan pemahaman kepada pegawai negeri pada Polri tentang kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat dalam bentuk sosialisasi;
4) meningkatkan kondisi tubuh yang sehat jasmani setiap pegawai negeri pada Polri dalam bentuk pemberian vaksinasi dan imunisasi.

g. Arah kebijakan Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dalam rangka pencapaian strategis pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit Bhayangkara Jambi berdasarkan standar KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit), yaitu :

1) Meningkatkan kemampuan SDM dalam pencapaian pemahaman tentang akreditasi Rumah Sakit melalui pelatihan / sosialisasi / workshop;
2) Melengkapi pilun – pilun yang dipersaratkan dalam standar akreditasi Rumah Sakit;
3) Melengkapi sarana prasaran yang dipersaratkan dalam akreditasi Rumah Sakit;
4) Melakukan survey akreditasi oleh tim KARS;

h. Arah kebijakan Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dalam rangka pencapaian strategi pelaksanakan pelayanan kesehatan yang prima dan dukungan kedokteran yang profesional sesuai dengan standar akreditasi Rumah Sakit dengan meningkatkan rasa emphaty (empati), responsif (ketanggapan), etika, rasa memiliki (sense of belonging), komitmen dan konsisten.

1) Meningkatkan pelayanan dukungan kedokteran kepolisian di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dalam bentuk :
   a) Meningkatkan kemampuan SDM dengan memberikan pelatihan / kejuruan dibidang dokpol, pelatihan internal secara berkesinambungan bagi petugas dokpol dan seluruh personil Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;
   b) Melengkapi sarana dan prasarana serta mengoptimalkan fasilitas yang ada untuk mendukung pelayanan di bidang dokpol;
   c) Melengkapi pilun-pilun bidang dokpol : SPO, Juklak, Juknis, serta sosialisasinya kepada petugas dokpol;
   d) Meningkatkan dan menjalin kerja sama yang baik dengan institusi lain seperti PPA di Polda maupun Polresta, LSM, Psykologi, dll yang berhubungan dengan komitmen dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2) melakukan kegiatan antisifatif terhadap ancaman penyakit menular tertentu seperti HIV/AID, TB paru, dan penyakit degeneratif lainnya, dengan menggiatkan upaya kesehatan promotif, kuratif, dan rehabilitatif bagi masyarakat Polri;
3) menempatkan SDM penentu dalam mencapai tujuan organisasi dalam bentuk:
   a) membangun SDM secara kuantitas dan kualitas;
   b) meningkatkan kemampuan SDM dengan memberikan pelatihan/kejuruan dibidang kesehatan dan manajemen tentang Rumah Sakit Bhayangkara guna meningkatkan pelayanan;
   c) membangun keterbukaan dan kerja sama tim yang tangguh dalam setiap pemecahan masalah;

d) meningkatkan kesejahteraan dan memberikan reward and punishmend secara adil dan obyektif.

4) membangun komitmen manajerial Rumah Sakit Bhayangkara untuk membuat standar-standar pelayanan (SPO), dan membudayakan pelayanan prima yang berfokus kepada keselamatan dan kenyamanan pasien.

5. Kerangka Regulasi Rumkit Bhayangkara

Rumkit Bhayangkata dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan pedoman maupun aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri maupun terhadap Satker Polda dan jajaran, serta masyarakat, karena tugas dan dan fungsi yang diemban adalah mendukung tugas pokok dan fungsi Polri serta berkaitan dengan masyarakat.

Renstra Rumkit Bhayangkara merupakan alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Rumkit Bhayangkara selain berisi perencanaan strategis, juga berisi tentang instrument strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran. Instrumen strategis tersebut yaitu berupa peraturan perundangan baik yang sifatnya mengikat keluar Rumkit Bhayangkara, maupun mengikat kedalam Rumkit Bhayangkara itu sendiri. Keseluruhan muatan instrument strategis tersebut, termuat dalam kerangka regulasi yang adalah perencanaan pembentukan regulasi yang dibutuhkan oleh

Rumkit Bhayangkara dalam kurun waktu tahun 2025 – 2029 dalam rangka memfasiltiasi, medorong dan mengatur serta medukung tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 4 mendeskripsikan kerangka regulasi Rumkit Bhayangkara tahun 2025 – 2029, sedangkan rincian Kerangka Regulasi dapar diliha pada lampiran dari dokumen Renstra Rumkit Bhayangkara Tahun 2025 – 2029 ini.

Tabel 4. Arah Kerangka Regulasi Rumkit Bhayangkara

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
1.	Pengaturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Bhayangkara	Perlu direvisi menyesuaikan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
2.	Pengaturan tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rencana penggabungan dengan SOTK Rumkit Bhayangkara Tk. II
3.	Pengaturan tentang Kedokteran Kepolisian	Perlunya pedoman tentang penyelenggaraan fungsi dokpol
4.	Pengaturan tentang pelayanan Kesehatan di lingkungan Polda Jambi	Sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan Kesehatan kepada anggota dilingkungan Polri
5.	Pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akuntansi Rumah Sakit Bhayangkara Polri	Perlu dirubah sesuai kondisi saat ini.
6.	Peraturan Karumkit Bhayangkara tentang Pembuatan visum hidup di lingkungan Polri	Belum ada pengaturan tentang pembuatan VeR dijajaran Rumkit, serta untuk menyeragamkan format VeR di Jajaran Rumkit

LAMPIRAN KEP KARUMKIT JAMBI
NOMOR : KEP/ 9 /VIII/2025
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2025

6. Kerangka Kelembagaan Rumkit Bhayangkara

Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan pedoman-pedoman maupun aturan-aturan sebagai petunjuk yang mengikat bagi personel sendiri maupun stake holders. Aturan atau regulasi yang ada pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi ditujukan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi jangka menengah maupun jangka pendek.

Renstra Rumah Sakit Bhayangkara Jambi merupakan alat untuk mencapai tujuan selain berisi perencanaan strategis juga berisi tentang instrumen strategis yang tersusun dalam kerangka regulasi Rumah Sakit Bhayangkara Jambi. Kerangka regulasi pada Renstra Rumah Sakit Bhayangkara Jambi berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Rumah Sakit Bhayangkara Jambi yang berbentuk peraturan-peraturan, Standar Operasional Prosedur dan Pedoman-pedoman yang direncanakan akan dibuat selama 5 (lima) tahun kedepan sejalan dengan kebijakan Pusdokkes Polri dan Polda Jambi tahun 2025 - 2029.

Kerangka regulasi dalam Renstra Rumah Sakit Bhayangkara Jambi tahun 2025 - 2029 memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Peraturan/SOP/Pedoman yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dan juga rencana usulan penghapusan Peraturan/SOP/Pedoman yang dinilai sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi selama 5 (lima) tahun kedepan. Dari isu strategis di bidang kedokteran dan kesehatan terhadap peningkatan mutu

pelayanan bidang kedokteran kepolisian dan pelayanan kesehatan disusun kerangka regulasi berdasarkan prioritas antara lain:

a. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pada dukungan kesehatan pada tugas operasional Polri diperlukan penyempurnaan SOP;
b. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya diperlukan peraturan tentang Pelayanan Kesehatan Polri;

c. Dalam rangka upaya pelayanan kedokteran kepolisian (Dokpol) diperlukan penyempurnaan kesepahaman dan pedoman / SOP;

d. Dalam rangka upaya kesehatan promotif dan preventif diperlukan pedoman / SOP.

Tabel 5. Kerangka Kelembagaan Rumkit Bhayangkara

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terwujudnya organisasi Rumkit Bhayangkara yang rasional, agile dan modern	a. Memperkuat kelembagaan Rumkit Bhayangkara	01 Program dukungan manajemen						

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3072 Pelayanan Kesehatan Polri						
			2) Penambahan peningkatan status Rumkit Bhayangkara		1 RS	1 RS	1 RS	1 RS	1 RS
			6) Rumkit Bhayangkara sebagai Satker BLU		1	1	1	1	1

LAMPIRAN KEP KARUMKIT JAMBI
NOMOR : KEP/ 9 /VIII/2025
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2025

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Rumkit Bhayangkara serta mendukung tercapainya kebijakan di level Polda, Pusdokkes Polri menetapkan 3 (tiga) tujuan dan telah dilengkapi dengan 8 (delapan) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Pusdokkes Polri dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6. Target Kinerja Rumkit Bhayangkara Jambi Tahun 2025 - 2029

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		BASE LINE	TARGET				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
SS 5	Tata kelola yang bersih, akuntabel dan transparan	IKP	Nilai AKIP	82,6 %	82,8 %	83 %	83,3 %	83,5 %	83,8 %
		IKP	Nilai NKA	85 %	85,2%	85,9%	86%	86,1%	86,4%

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan beberapa Program di lingkungan Rumkit Bhayangkara, yaitu sebagai berikut:

a. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana;
b. Program Dukungan Manajemen.

2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi pelaksanaan kegiatan kedokteran dan Kesehatan kepolisian dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Polri, serta mencapai targer sasaran utama sebagaimana disebutkan diatas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (Rupiah Murni (RM), dan Badan Layanan Umum (BLU). Pendanaan akan digunakan untuk operasional Rumah Sakit, yakni fokus pada kepentingan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana terlampir.

Tabel 7. Kerangka Pendanaan Rumkit Bhayangkara Jambi Tahun 2025 – 2029

LAMPIRAN KEP KARUMKIT JAMBI
NOMOR : KEP/ 9 /VIII/2025
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	KELUARAN	SUMBER PENDANAAN	KET
1.	Tata Kelola yang bersih, transparan dan akuntabel	1) Meningkatkan menejemen kierja Rumkit Bhayangkara 2) Meningkatkan akuntabilitas Perencanaan dan penganggaran Rumkit Bhayangkara 3) Meningkatakan nilai IKPA Rumkit Bhayangkara 4) Modernisasi sarpras Sesuai dengan perkembangan teknologi disektor Kedokteran dan kesehatan	RM	

Guna memastikan pencapaian sasaran strategis dalam pelaksanaan program, maka dijabarkanlah angka dasar selama lima tahun dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebagai indikasi pendanaan Rumkit Bhayangkara sebagaimana terdapat pada lampiran. Rencana pendanaan ini bersifar indikatif dana dapat berubah menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rincian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran dari Renstra Rumkit Bhayangkara.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Rumkit Bhayangkara Jambi Tahun 2025 – 2029 merupakan perencanaan jangka mengengah Rumkit Bhayangkara yang disusun dengan menjabarkan sasaran pembangunan nasional serta visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, serta strategi Polri yang ada keterkaitannya dengan Rumkit Bhayangkara ke dalam Renstra Rumkit Bhayangkara Jambi.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan lingkungan strategis, dan arah kebijakan Polri. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Satker dan personel Polri sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Rumkit Bhayangkara Tahun 2025– 2029 dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) program di Rumah Sakit Bhayangkara, yaitu sebagai berikut:

1. program Dukungan Manajemen;
2. program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;

1. Kaidah Pelaksana

a. Dengan komitmen terus berupaya mewujudkan visi dan misi perencanaan yang telah ditetapkan bersama.

b. Membangun kemitraan secara sinergis dengan Lembaga/fungsi/komponen masyarakat dalam rangka mewujudkan visi misi yang bermanfaat bagi Polri dan masyarakat.

c. Pertumbuhan dan pembelajaran baik sebagai individu maupun organisasi sehingga meningkatkan proses dan kinerja secara berkelanjutan.

d. Pelayanan prima, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, humanis, tidak diskriminatif dan etis.

e. Kegiatan operasional Rumkit Bhayangkara pada prinsipnya terprogram secara rinci pada RKA-K/L dan DIPA Rumkit Bhayangkara setiap tahunnya,

LAMPIRAN KEP KARUMKIT JAMBI
NOMOR : KEP/ 9 /VIII/2025
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2025

2. Autentifikasi dan Distribusi

a. Autentifikasi, Renstra Rumkit Bhayangkara merupakan jabaran dari Renstra Polda Jambi dan disahkan oleh Kapolda sebagai pimpinan Polda Jambi sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran.

b. Distribusi, didistribusikan kepada seluruh jajaran Rumkit Bhayangkara untuk dipedomani dan dijabarkan ke dalam rencana tahunan untuk pencapaian *output* dan *outcome*.

Demikianlah Rencana Strategis (Renstra) Rumkit Bhayangkara tahun 2025 – 2029 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok Rumkit Bhayangkara Jambi.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : Agustus 2025
KEPALA RUMKIT SAKIT BHAYANGKARA JAMBI

POLRI DAERAH JAMBI
KEPALA
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.III

Dr.dr. SYAHRUL., Sp. Rad. M.Kes.QHIA
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74060758